



**PROVINSI
KALIMANTAN
UTARA**



RENCANA STRATEGIS 2025–2029

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, team penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk Dokumen, yang berjudul “ Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029”. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan strategis, sasaran dan target strategis. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari, Rencana Strategis ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Rencana Strategis ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun masyarakat, serta DPRD yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.



Tanjung Selor, 30 September 2025
Kepala Dinas

Burhanuddin, S,Sos., Msi.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	16
2.2.2 Sarana dan Prasarana	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3.2 Capaian Anggaran dan Realiasi Pendanaan Perangkat Daerah	37
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	40
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	41
2.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	42
2.8 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
2.9 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
2.10 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kalian Lingkungan Hidup Strategis Perangkat Daerah	46
2.11 Penentuan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	48
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	50
3.2.1 Strategi Perangkat Daerah	50
3.2.2 Arah Kebijakan Kepala Daerah	51
3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah.....	58
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	59
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.....	142
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	142
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	142
BAB V PENUTUP	144
5.1 Kesimpulan	144
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	144
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	144



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian	16
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Golongan	16
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	17
Tabel 2.4	Proyeksi Kebutuhan Pegawai DPPPAPPKB.....	17
Tabel 2.5	Daftar Inventaris Dinas P3AP2KB	20
Tabel 2.6	Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU).....	21
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
Tabel 2.8	Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	24
Tabel 2.9	Persentase Sumbangan Pendapatan Kab/Kota.....	25
Tabel 2.10	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kab/Kota ..	26
Tabel 2.11	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi	27
Tabel 2.12	Capaian Kab/Kota Layak Anak Kalimantan Utara.....	29
Tabel 2.13	Data Kekerasan terhadap Perempuan di Kalimantan Utara.....	30
Tabel 2.14	Data Kekerasan terhadap Anak di Kalimantan Utara	31
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas	38
Tabel 2.16	Kelompok Sasaran Layanan	40
Tabel 2.17	Mitra Perangkat Daerah	40
Tabel 2.18	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja	42
Tabel 2.19	Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas	42
Tabel 2.20	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	43
Tabel 2.21	Perumusan Isu Perangkat Daerah.....	47
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	49
Tabel 3.2	Penentuan Strategi Perangkat Daerah.....	50
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	52
Tabel 3.4	Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	58
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	60
Tabel 4.2	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	64
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	80
Tabel 4.4	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPTD	131
Tabel 4.5	Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	140
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	142
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	142



Daftar Gambar

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPTD	15
Gambar 2.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan.....	16
Gambar 2.4	Keadaan Jenjang Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah ...	17
Gambar 2.5	Capaian IDG menurut Kab/Kota 2021-2024.....	23
Gambar 2.6	Capaian Indikator Komponen Penyusun IDG Provinsi 2024 ..	24
Gambar 2.7	Anggaran Responsif Gender Provinsi 2022-2024	28
Gambar 2.8	Tren Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi 2020-2024.....	32
Gambar 2.9	Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Utara 2022-2024	33
Gambar 2.10	Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total Provinsi Kalimantan Utara 2022-2024.....	34
Gambar 2.11	Angka Kelahiran Spesifik Umur (ASFR) 15-19 Tahun Provinsi Kalimantan Utara 2022-2024.....	35
Gambar 2.12	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) Provinsi Kalimantan Utara 2022-2024.....	36
Gambar 2.13	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) Provinsi Kalimantan Utara 2022-2024.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Utara 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2025 - 2029. Penyusunan Dokumen Renstra sangat terkait dengan Visi, Misi Gubernur dalam RPJMD. Rencana Strategi DP3APPKB disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif.

Fungsi Rencana Strategis DP3APPKB disusun untuk menjawab pertanyaan : kemana pelayanan DP3APPKB akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategi apa yang perlu dilakukan oleh DP3APPKB agar tujuan tercapai. Rencana Strategi juga berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Gubernur dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas DP3APPKB serta tolok ukur pencapaiannya.

Dokumen rencana strategis DP3APPKB diharapkan mampu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Lintas Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan rencana strategis DP3APPKB yang dilakukan melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Mengacu pada kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan Misi Pertama secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sangat mendukung upaya implementasi kebijakan GEDSI. Wilayah Kalimantan Utara, dengan kondisi demografis dan sosial yang sangat beragam, membutuhkan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat adat dan minoritas. Dalam konteks ini, program GEDSI menjadi prioritas yang harus dijalankan untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan inklusif. Melalui RENSTRA DPPPAPPKB, program GEDSI diharapkan dapat dilaksanakan dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan lokal, dengan memperhatikan karakteristik sosial dan budaya yang ada. Selain itu, kolaborasi antar instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memastikan program ini dapat memberikan dampak yang maksimal. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sumber daya yang memadai, serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, implementasi GEDSI di Kalimantan Utara diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi seluruh warga, khususnya mereka yang selama ini terpinggirkan.

DPPPAPPKB Kalimantan Utara akan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya mendorong pemberdayaan perempuan dan anak, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas dan memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat menjawab tantangan inklusi sosial bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi.

Dengan demikian Rencana strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif di DP3APPKB yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara, mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, dan membantu DP3APPKB untuk menemukan dan mendefinisikan kembali masalah utama (isu kritis) yang dihadapi DP3APPKB terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan. Oleh karena itu rencana strategis DP3APPKB menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat. baik formula maupun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah benar-benar mampu mendukung visi, misi dan program Gubernur dan RPJMD dengan memperhatikan agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP-KB) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa landasan hukum yang bisa dijadikan pijakan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (konvensi tentang hak-hak anak);
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
23. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
25. Permendagri No 67 Tahun 2012 tentang perubahan atas permendagri 15-2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah;
26. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri 54 tahun 2010 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah;
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat

- Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 590);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
 34. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025
 36. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045
 38. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 39. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Utara;
 40. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 2025 - 2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 ini adalah :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan kepala daerah.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai

dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan.
- 4) Sebagai acuan stakeholder dalam pelaksanaan Sub Kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) berdasarkan target-target indikator yang tertuang di dalamnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) DP3APPKB Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat

daerah, kelompok sasaran layanan perangkat daerah, mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan juga program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

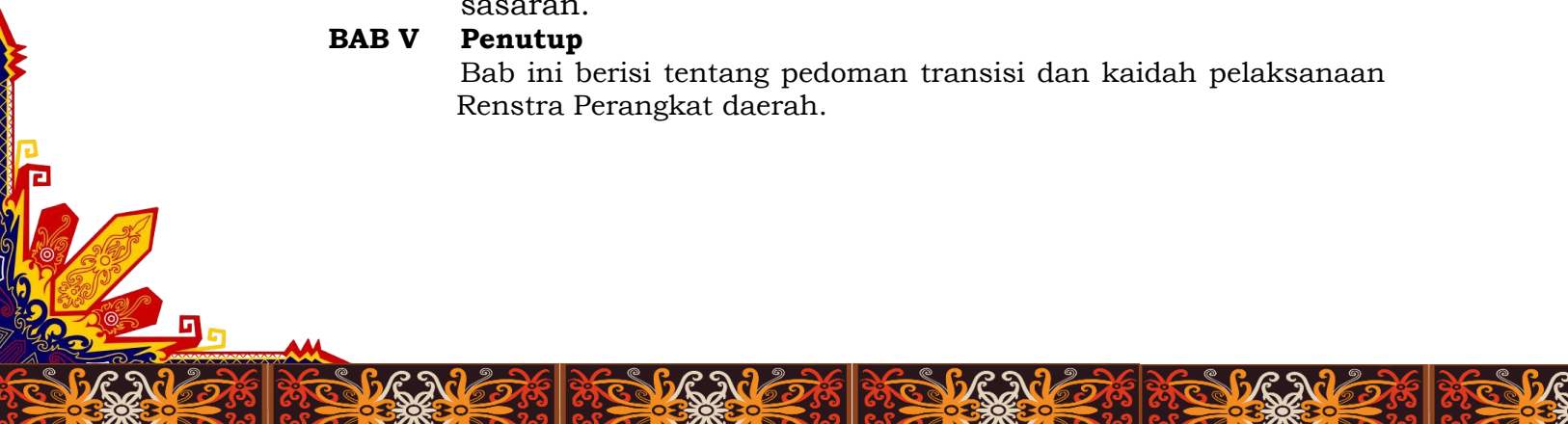
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan targetnya dan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara adalah unsur Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala. DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di Bidang Perlindungan Perempuan;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan Koordinasi dan Pengendalian Teknis di Bidang Kualitas Keluarga;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di Bidang Sistem Data Gender dan Anak;
- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- g. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di Bidang Perlindungan Khusus Anak;
- h. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk;
- i. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di Bidang Keluarga Berencana (KB);
- j. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di Bidang Keluarga Sejahtera;
- k. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Secara umum DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan 2 urusan pemerintahan bidang yaitu:

- 1) Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak;
- 2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan 2 urusan tersebut dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu :

- 1) Bidang Kualitas Hidup perempuan dan Anak,
- 2) Bidang Pemenuhan Hak Anak,
- 3) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, dan
- 4) Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan urusan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemberdayaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian kependudukan keluarga berencana, maka Susunan organisasi DP3AP2KB Provinsi Kaltara, sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat membawahkan;
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6) Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 9) Unit Pelaksana Teknis;
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengaduan;
 - c. Seksi Tindak Lanjut.

Adapun tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
 - a. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
 - b. Merumuskan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 - c. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketetapan pencapaian sasaran program;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
 - e. Mendistribusikan tugas kepada Sekertariat dan Bidang- Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan seuai dengan program kerja masing-masing;
 - f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dan

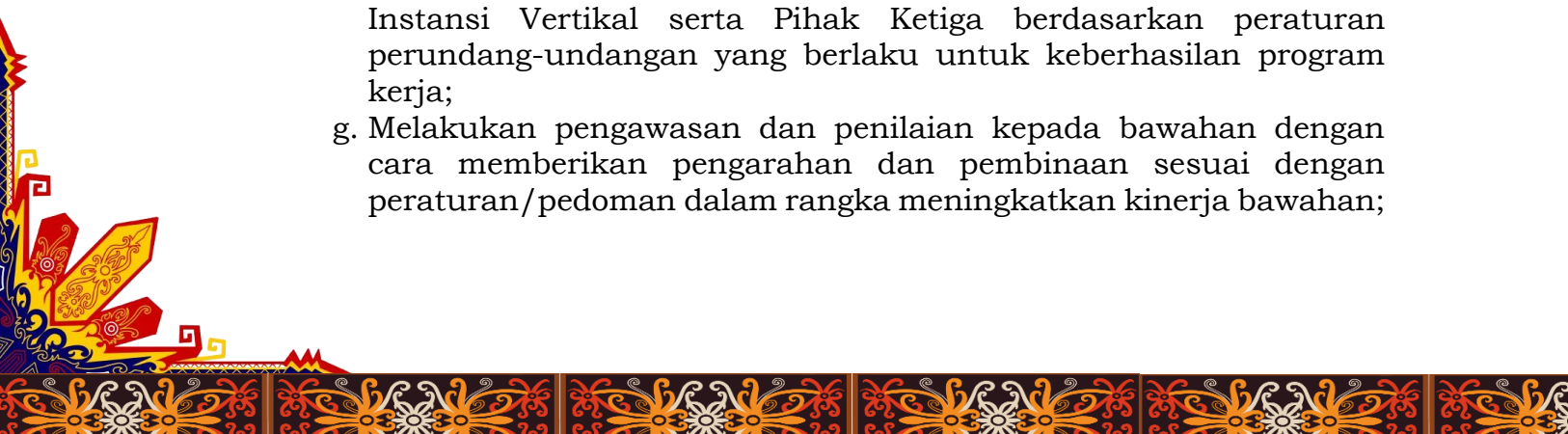
menetapkan standar pelayanan minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

- h. Melakukan kerjasama di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, serta Mitra Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- i. Memfasilitasi kegiatan bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- k. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- l. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2) Sekretariat

Tugas pokok sekretariat adalah untuk memperlancar organisasi DP3AP2KB dengan pelayanan kinerja cenderung intern organisasi, untuk menjalankan tugas tersebut. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;



- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Tugas bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga adalah merumuskan kebijakan dalam urusan peningkatan kualitas perempuan dan keluarga. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan, Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas perempuan dan keluarga melalui kegiatan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) , Kelompok Usaha Perempuan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan;
- h. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kelompok usaha perempuan untuk peningkatan keterampilan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan program Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga untuk mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4) Bidang Pemenuhan Hak Anak

Tugas bidang Pemenuhan Hak Anak adalah melakukan peningkatan pemenuhan hak anak. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan peningkatan pemenuhan hak anak, sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
- g. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang Pemenuhan Hak Anak dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan untuk peningkatan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- i. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan program Bidang Pemenuhan Hak Anak untuk mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah melakukan pembinaan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bidang Pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;



- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Melaksanakan gerakan KB melalui peningkatan pelayanan dan peralatan kontrasepsi untuk meningkatkan kesertaan masyarakat dalam ber-KB ;
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan dan penyuluh keluarga berencana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
- h. Mengkoordinasi kegiatan teknis Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk sinkronisasi program;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- j. Memfasilitasi kerjasama Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana se-Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal sert mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas da melaporkan kepada pimpinan.

6) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Tugas bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Perlindungan Hak Perempuan dan pemenuhan hak-hak atas Anak. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;

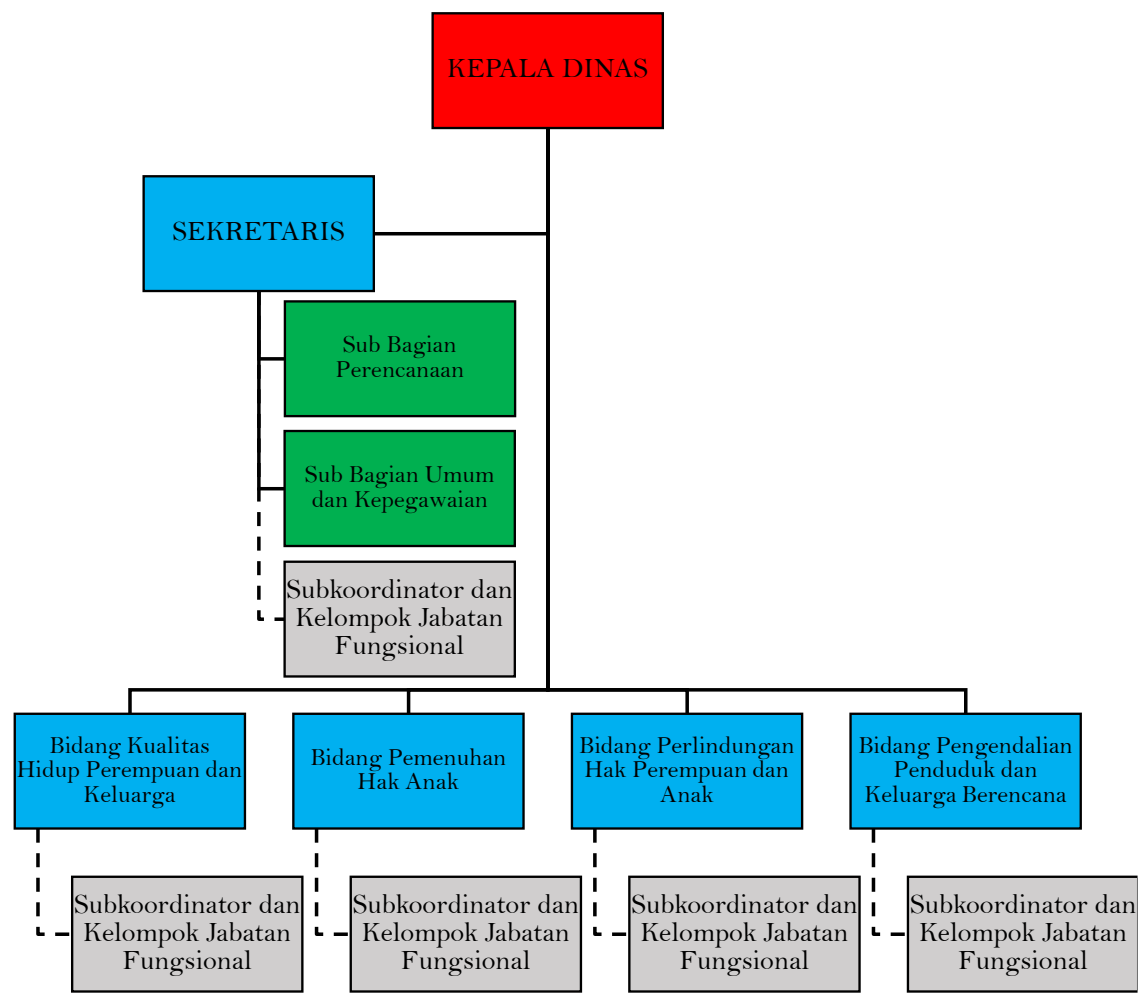
- f. Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk kegiatan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
- g. Melakukan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapaian program;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- i. Memfasilitasi kerjasama Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dengan instansi terkait, Antar Negara, Antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak untuk mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

\



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara



7) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan kegiatan teknis operasional di Wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

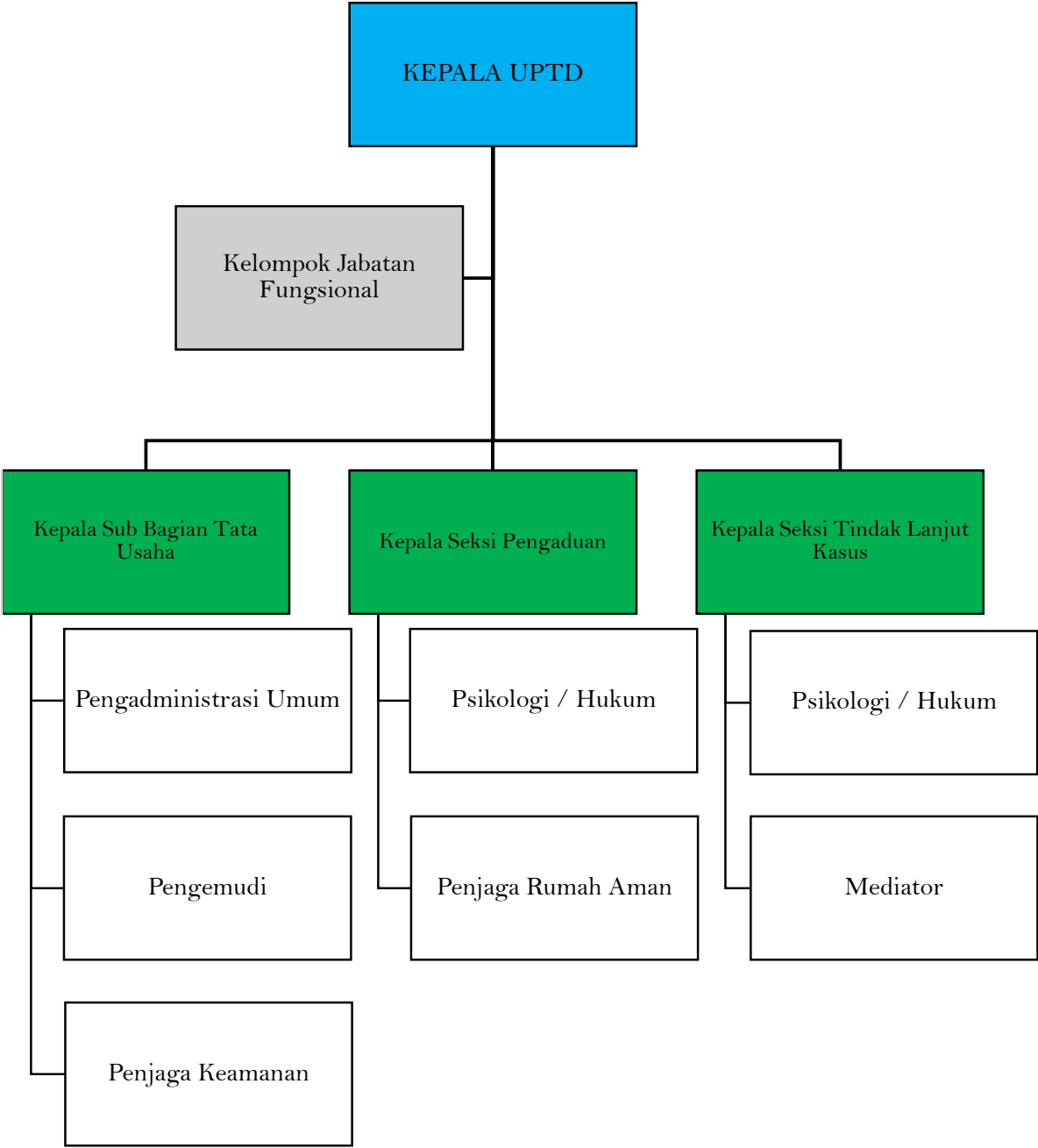
- a. Pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
- b. Pemberian layanan pendampingan hukum;
- c. Pemberian layanan pendampingan psikologis;
- d. Pemberian layanan pendampingan bimbingan rohani;
- e. Pemberian perlindungan khusus;
- f. Pemberian layanan penjangkauan korban;
- g. Pemberian layanan mediasi terkait kasus anak;
- h. Pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
- i. Pemberian rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan;
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan anak;

Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara, tergambar sebagai berikut :



Gambar 2.2

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Utara



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan saranaprasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB)Provinsi Kalimantan Utara didukung sumber daya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai disajikan terpilah laki-laki dan perempuan pada tabel berikut :

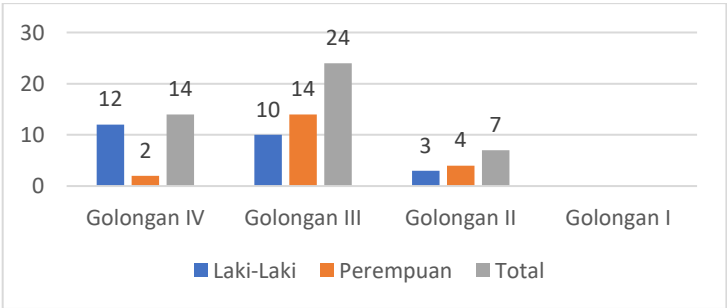
Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	25	20	45
2.	Non ASN (Tenaga Kontrak)	10	5	15
Jumlah		35	25	60

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	12	2	14
2.	Golongan III	10	14	24
3.	Golongan II	3	4	7
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		25	20	45

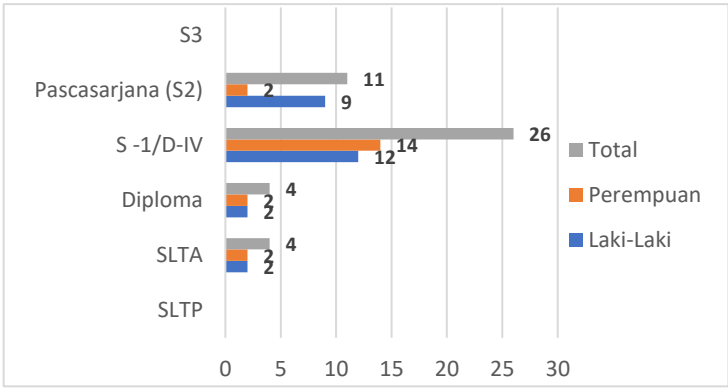
Gambar 2.3
Komposisi pegawai berdasarkan Golongan



Tabel 2.3
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	SLTP	-	-	-
2.	SLTA	2	2	4
3.	Diploma	2	2	4
4.	S – I / D - IV	12	14	26
5.	Pascasarjana (S2)	9	2	11
6.	S3	-	-	-
Jumlah		25	20	45

Gambar 2.4
**Keadaan Jenjang Aparatus Sipil Negara Dinas P3AP2KB
Provinsi Kalimantan Utara**



Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa kondisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan di lingkungan pemerintahan DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana (S1) yang berjumlah 26 orang dari 45.

Tabel 2.4
Proyeksi Kebutuhan Pegawai DPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI DPPAPPKB														
NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK	PROYEKSI									
					JUMLAH YANG AKAN Pensiun					PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	BAGIAN KEUANGAN	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN KEUANGAN	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
3	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN KEUANGAN	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
4	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN KEUANGAN	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
5	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	BAGIAN KEUANGAN	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
6	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	BAGIAN KEUANGAN	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
7	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
8	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI DPPPPAPKE														
NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK	PROYEKSI									
					JUMLAH YANG AKAN Pensiun					PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
9	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
12	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
14	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
15	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
16	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
17	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA	1	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
18	PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
19	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
20	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
21	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
22	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	2	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
23	PENALAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
24	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
25	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
26	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
27	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
28	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
29	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
30	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
31	PENALAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
32	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
33	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
34	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
35	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
36	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
37	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
38	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI DPPPAPKBE														
NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	PEGAWAI SAAT INI	KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK	PROYEKSI									
					JUMLAH YANG AKAN Pensiun					PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
39	PENELAAH TEKNIS KEBLIJAKAN	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
40	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
41	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
42	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
43	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
44	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
45	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	BAGIAN TU UPTD	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
46	PENELAAH TEKNIS KEBLIJAKAN	BAGIAN TU UPTD	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
47	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN TU UPTD	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
48	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	BAGIAN TU UPTD	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
49	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN TU UPTD	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
50	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	BAGIAN TU UPTD	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
51	KONSELOR SDM	SEKSI PENGADUAN UPTD	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
52	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SEKSI PENGADUAN UPTD	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
53	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SEKSI PENGADUAN UPTD	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
54	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SEKSI PENGADUAN UPTD	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
55	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SEKSI TINDAK LANJUT UPTD	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
56	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	SEKSI TINDAK LANJUT UPTD	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
57	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SEKSI TINDAK LANJUT UPTD	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
58	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SEKSI TINDAK LANJUT UPTD	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JUMLAH			40	93	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara sementara hanya memiliki 1 Gedung Utama yang bertempat di Lantai 2 Gedung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara. Gedung terdiri dari Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretariat, Ruang Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Ruang Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Ruang Bidang Pemenuhan Hak Anak, Ruang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Setiap ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, scanner serta jaringan WiFi,sebagaimana data aset pada Tabel 2.4 sebagai berikut ini.

Tabel 2.5
Daftar Inventaris Dinas P3AP2KB Tahun 2025

No	Nama	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Layak	Tidak Layak	
A.	KOMPUTER	Unit	√		205
	- Personal Computer	Unit	√		23
	- Lap Top	Unit	√		35
	- Note Book	Unit	√		3
	- Tablet PC	Unit	√		1
	- Personal Komputer lainnya	Unit	√		1
	- Komputer Unit Lainnya	Unit	√		1
	- Hard Disk	Unit	√		8
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	√		24
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	√		1
B.	ALAT ANGKUTAN	Unit			16
	- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan lainnya	Unit	√		3
	- Pick Up	Unit	√		2
	- Sepeda Motor	Unit	√		11
C.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Unit			66
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Unit	√		1
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Unit	√		4
	- Mesin Penghitung Uang	Unit	√		1
	- Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Unit	√		1
	- Mesin Absensi	Unit	√		1
	- Papan Nama Instansi	Unit	√		3
	- Meja Kerja Kayu	Unit	√		7
	- Kursi Besi/Metal	Unit	√		8
	- Meja Resepsionis	Unit	√		1
	- Sofa	Unit	√		1
	- Lemari Es	Unit	√		1
	- Kipas Angin	Unit	√		4
	- Alat Dapur lainnya	Unit	√		5
	- Televisi	Unit	√		2
	- Amplifier	Unit	√		1
	- Loudspeaker	Unit	√		2
	- Microphone	Unit	√		3
	- Camera Video	Unit	√		4
	- Dispenser	Unit	√		3
	- Bracket Standing Peralatan	Unit	√		1
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	√		1
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	√		5
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	√		3
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	√		3
D.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	Unit			21
	- Microphone/Wireless MIC	Unit	√		6
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	√		13
	- Layar Film/Projector	Unit	√		2
E.	ALAT LABORATORIUM	Unit			5
	- Steril Bottle Witt, Cup	Unit	√		2
	- Uninterrupted Power Supply (UPS)	Unit	√		3
F.	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	Unit			13
	- Alat Musik Modern/Band	Unit	√		13

Tabel 2.6

Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
Tahun Anggaran 2026-2030

No	Nama/Jenis Barang	Tahun Kebutuhan				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Kendaraan Roda Empat	0	0	0	4	1
2	Kendaraan Roda Dua	0	3	3	3	2
3	Laptop	2	3	2	3	3
4	Penghancur Kertas	0	2	0	1	1
5	PC	3	2	3	2	3
6	UPS	2	2	2	2	2
7	Kulkas Mini	0	0	1	0	0
8	Printer	3	3	3	3	3
9	Papan DUK	0	1	0	0	0
10	Papan Informasi	0	1	0	1	0
11	Feeling Kabinet	0	1	1	0	1
12	LCD Proyektor	0	1	1	0	0
13	Layar LCD	0	0	1	3	0
14	Televisi	1	0	1	1	0
15	Meja Kerja 1/2 Biro	0	3	2	0	2
16	Lemari Arsip	2	2	1	1	1
17	Pemotong Kertas	0	1	1	0	1
18	Air Conditioning (AC)	0	2	0	0	2
19	Sofa Ruang Tamu	0	1	1	0	0

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

DP3APPKB merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan fungsinya adalah sebagai eksekusi dari pelaksanaan program dan kegiatan, maka dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi langsung kepada masyarakat korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2021-2024 secara terinci sebagaimana Tabel di bawah ini :



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas P3AP2KB Kalimantan Utara

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	86,67	63,70	65,90	68,12	70,34	61,70	61,92	58,86	67,83	96,86	93,96	86,40	96,43
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	47,62	47,64	47,66	47,68	47,70	48,44	49,30	53,60	52,14	101,67	103,44	112,41	109,30
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	2,37	2,42	2,52	2,60	2,70	2,42	2,52	2,6	3,21	100	100	100	118,88
	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	20	20	20	40	40	20	40	40	40	100	100	100	100
	Rasio Kekerasan terhadap Anak	4,16	4,15	4,13	4,10	4,07	N/A	N/A	6,32	7,41	N/A	N/A	64,80	54,80
	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	49,2	49,00	47,00	45,00	43,00	N/A	N/A	62,19	57,88	N/A	N/A	72,30	74,30
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,11	63,71	64,00	65,00	66,00	60,72	63,35	63,95	63,95	95,30	99,29	98,38	96,89
1.2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,69	58,20	60,32	62,44	64,55	54,18	56,14	64,31	65,45	93,09	93,07	102,99	101,39
	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,9	2,20	2,17	2,15	2,12	2,66	2,35	2,28	2,27	120,90	108,29	106,04	107,07
	Angka Kelahiran Remaja (ASFR) 15-19	27,1	13	13	11	11	27,10	33,86	19,4	26,1	208,46	38,40	56,70	42,10
	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	67	56,97	57,32	57,68	58,13	78,5	57,4	51,04	56,80	137,79	100,13	88,48	97,71
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	21,92	13,18	12,96	12,73	12,57	25,38	20,53	15,25	14,60	192,56	63,10	83,40	86,20

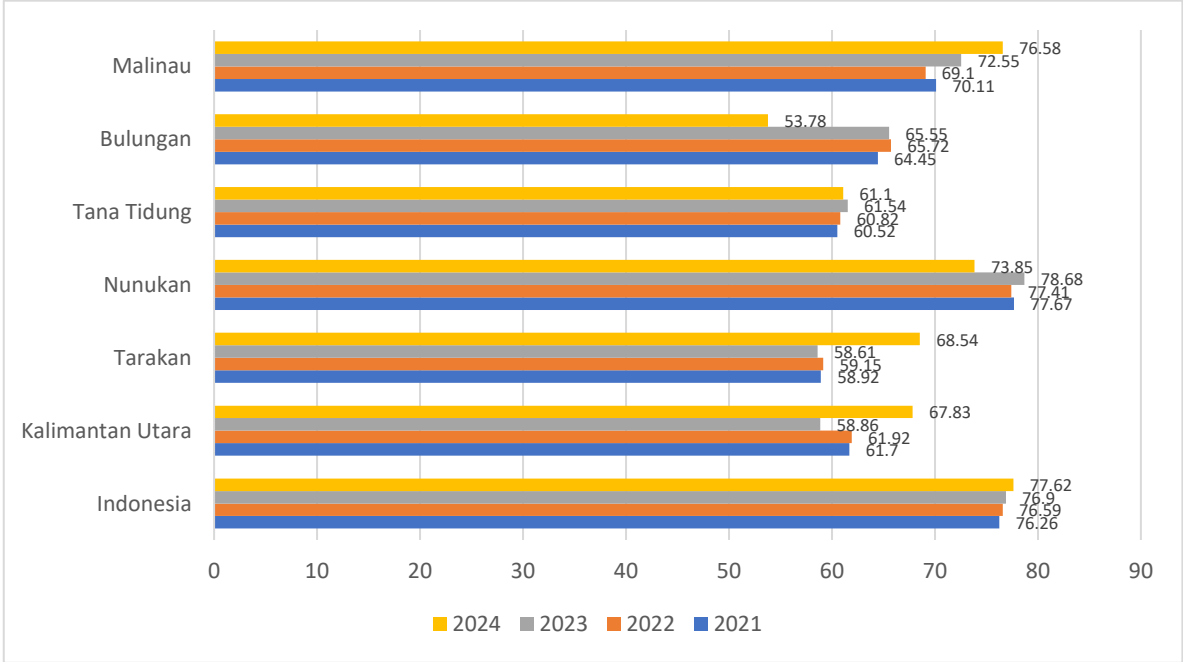


A. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indonesia secara nasional mengalami peningkatan bertahap setiap tahun, dari 76,26 (2021) menjadi 77,62 (2024). Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami peningkatan signifikan dari 61,7 pada tahun 2021 menjadi 67,83 pada tahun 2024. Namun, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 (58,86), yang kemudian meningkat kembali secara signifikan di tahun berikutnya.

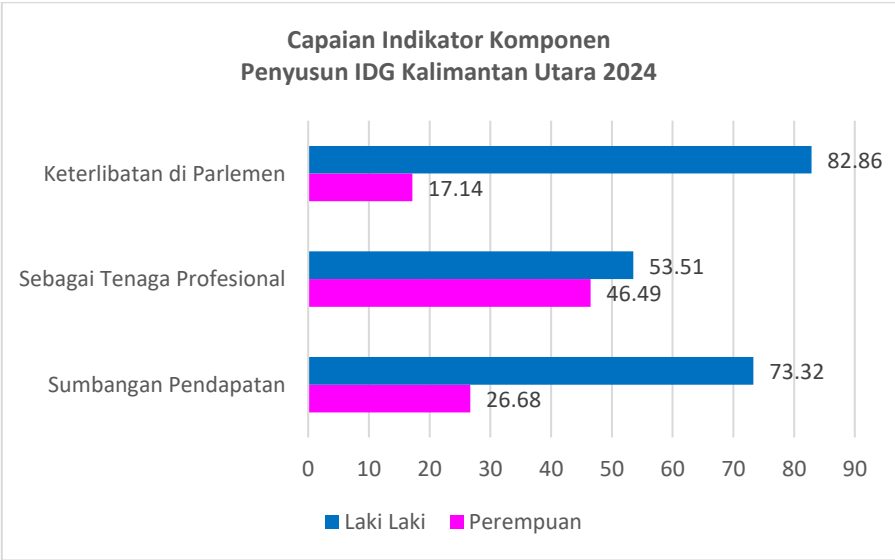
Gambar 2.5
Capaian IDG menurut Kab/Kota 2021-2024



IDG tarakan meningkat secara stabil setiap tahun, dari 58,92 (2021) menjadi 68,54 (2024). Ini menunjukkan adanya peningkatan pemberdayaan gender yang konsisten. Nunukan awalnya memiliki nilai yang cukup tinggi pada tahun 2021 (77,67), tetapi mengalami fluktuasi, turun menjadi 73,85 pada tahun 2024. Meskipun ada penurunan, angka tersebut tetap di atas rata-rata provinsi dan nasional, menandakan posisi Nunukan relatif kuat dalam pemberdayaan gender. Tana Tidung mengalami peningkatan pada tahun 2022, namun turun lagi pada 2023 dan stagnan hingga 2024 dengan nilai 61,1. Ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan pemberdayaan gender. Bulungan Mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 (64,45 ke 65,72), namun kemudian mengalami penurunan drastis pada 2024 (53,78). Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena capaian Bulungan menjadi yang terendah di antara wilayah lainnya. Malinau mengalami fluktuasi, tetapi secara umum meningkat signifikan hingga mencapai 76,58 pada tahun 2024. Nilai ini cukup tinggi dan hampir menyamai capaian nasional. Secara umum, walaupun ada fluktuasi pada beberapa kabupaten, provinsi Kalimantan Utara mengalami kemajuan positif. Langkah-langkah peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial harus terus diperkuat. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, capaian IDG Provinsi Kalimantan Utara berada di urutan 31 dari 38 Provinsi lainnya, sedangkan untuk wilayah Pulau Kalimantan berada di paling bawah dengan Kalimantan Tengah memiliki IDG tertinggi diantara Provinsi di Pulau Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif perempuan di bidang politik dan ekonomi dan dunia kerja masih sangat rendah. Indeks Pemberdayaan Gender dibentuk oleh tiga indikator yaitu (1)

Persentase perempuan dalam parlemen, (2) Perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) Sumbangan pendapatan perempuan.

Gambar 2.6
Capaian Indikator Komponen Penyusun IDG Provinsi Kalimantan Utara 2024



a. Perempuan dalam Parlemen

Angka keterlibatan perempuan di tingkat provinsi mengalami fluktuasi signifikan, dari 14,29% pada 2020 turun hingga titik terendah 8,57% pada 2023, lalu kembali meningkat signifikan ke 17,14% pada 2024. Kondisi ini mencerminkan dinamika politik di tingkat provinsi yang cukup dinamis, namun secara keseluruhan masih rendah dibanding target ideal (minimal 30% menurut UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Menjadikan Nunukan sebagai percontohan praktik baik dalam pemberdayaan politik perempuan di tingkat lokal untuk diterapkan di kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara.

Tabel 2.8
Persentase Keterlibatan Perempuan
Dalam Parlemen Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Malinau	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00
2.	Bulungan	20,00	20,00	20,00	20,00	8,00
3.	Tana Tidung	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4.	Nunukan	32,00	32,00	32,00	32,00	23,33
5.	Tarakan	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00
6.	Kalimantan Utara	14,29	11,43	11,43	8,57	17,14

Kabupaten Nunukan merupakan daerah dengan capaian terbaik dan paling konsisten, bisa dijadikan role model untuk wilayah lain di Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan di tahun terakhir. Kabupaten Bulungan mengalami penurunan drastis di tahun 2024, ini menjadi catatan kritis yang perlu perhatian serius dan evaluasi mendalam. Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan memiliki angka yang stabil namun masih rendah, menunjukkan

bahwa intervensi strategis diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik.

b. Sumbangan Pendapatan Kerja

Selain komponen di atas, sumbangan pendapatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 masih didominasi laki-laki sebesar 73,12. Persentase sumbangan pendapatan perempuan hanya sebesar 26,88 persen. Malinau memiliki tren konsisten naik dari 28,21% (2020) menjadi 29,05% (2024). Malinau memperlihatkan kemajuan stabil dalam kontribusi ekonomi perempuan, menandakan efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Bulungan memiliki kontribusi relatif rendah dan cenderung stagnan: 21,95% (2020) dan sedikit meningkat menjadi 22,57% (2024). Capaian relatif rendah ini menunjukkan perlunya upaya tambahan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi perempuan di wilayah Bulungan. Tana Tidung. Menunjukkan tren yang fluktuatif, mulai dari 22,52% (2020), naik menjadi 22,96% (2021–2022), tetapi turun lagi menjadi 24,07% di tahun 2024. Meski ada fluktuasi, Tana Tidung mengalami peningkatan secara keseluruhan selama periode analisis. Nunukan mengalami sedikit penurunan dari 27,88% (2020) menjadi 26,88% (2024). Meskipun angkanya cukup tinggi, tetapi penurunan ini perlu diwaspadai agar tidak terus berlanjut di tahun mendatang. Tarakan Kondisi relatif stabil dengan sedikit fluktuasi antara 26,18% (2020) dan 25,59% (2024). Meskipun relatif stabil, ada kecenderungan sedikit penurunan yang perlu menjadi perhatian khusus.

Malinau dapat menjadi contoh baik dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan bagi wilayah lain di Kalimantan Utara. Bulungan memerlukan intervensi kebijakan yang fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi perempuan. Program pelatihan kewirausahaan perempuan, akses permodalan, dan dukungan pengembangan usaha mikro khusus perempuan sangat dianjurkan, terutama bagi wilayah yang stagnan atau mengalami penurunan kontribusi perempuan dalam perekonomian daerah.

Tabel 2.9
Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Kab/Kota

No	Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Malinau	28,21	28,60	28,38	28,98	29,05
2.	Bulungan	21,95	21,63	22,13	22,10	22,57
3.	Tana Tidung	22,52	22,96	22,96	24,22	24,07
4.	Nunukan	27,38	27,47	27,28	27,25	26,88
5.	Tarakan	26,13	25,90	25,91	25,89	25,59
6.	Kalimantan Utara	26,58	26,92	26,91	26,88	26,68

c. Perempuan sebagai Tenaga Professional

Upaya untuk meningkatkan komponen pembentuk IDG di level kabupaten secara otomatis akan berdampak terhadap capaian pada level provinsi. Kecuali untuk indikator keterwakilan perempuan dalam parlemen. Akan tetapi, keterlibatan perempuan dalam politik di tingkat kab/kota lambat laun akan berpengaruh terhadap capaian provinsi. Parlemen perempuan di tingkat Kab/Kota perlu didorong untuk ikut terlibat berkontentasi di level provinsi.

Selama ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara aktif mendorong mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan melalui berbagai program kegiatan khususnya di bidang ekonomi dan politik.

Salah satu isu lain terkait kesetaraan gender yang cukup menarik perhatian adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ketenagakerjaan. Pada umumnya terjadi ketimpangan pada berbagai aspek ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Misalnya rendahnya kesempatan kerja, kurangnya kompetensi, maupun upah/gaji yang rendah. Kondisi-kondisi tersebut masih umum dijumpai di berbagai daerah termasuk di Kalimantan Utara. Mengingat pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan di Kalimantan Utara, maka dituntut peranan perempuan khususnya perempuan yang bekerja untuk mengambil peran lebih besar dalam menciptakan kesetaraan gender, khususnya dalam hal ketenagakerjaan.

Secara umum, Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan positif dari 42,17% (2020) menjadi 46,49% (2024). Kenaikan ini menunjukkan efektivitas kebijakan provinsi dalam mendorong perempuan menjadi tenaga kerja profesional yang kompetitif.

Tabel 2.10
Persentase Perempuan sebagai Tenaga Professional Menurut Kab/Kota

No	Kabupaten/Kota	Perempuan Sebagai Tenaga Professional Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Malinau	33,38	37,30	33,57	45,63	45,16
2.	Bulungan	45,32	43,51	43,79	46,16	44,07
3.	Tana Tidung	35,47	37,32	43,66	50,45	41,78
4.	Nunukan	39,52	38,43	37,91	49,12	43,94
5.	Tarakan	45,64	48,82	48,38	45,92	51,95
6.	Kalimantan Utara	42,17	42,91	43,18	46,97	46,49

Kota Tarakan memperlihatkan capaian terbaik dengan persentase perempuan sebagai tenaga profesional tertinggi. Kabupaten Malinau dan Nunukan juga mencatatkan tren positif yang baik. Kabupaten Tana Tidung perlu menjadi perhatian karena

terjadi penurunan signifikan, meskipun awalnya memiliki capaian tinggi. Perlu ada evaluasi mendalam terhadap faktor penyebab penurunan di Tana Tidung agar dapat segera diatasi dengan intervensi kebijakan spesifik. Kota Tarakan dapat menjadi model pembelajaran bagi daerah lain dalam hal strategi pemberdayaan profesional perempuan. Program pendidikan tinggi, pelatihan profesional, dan kebijakan afirmasi yang mendorong partisipasi perempuan di sektor-sektor strategis harus terus diperkuat oleh pemerintah provinsi Kalimantan Utara untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

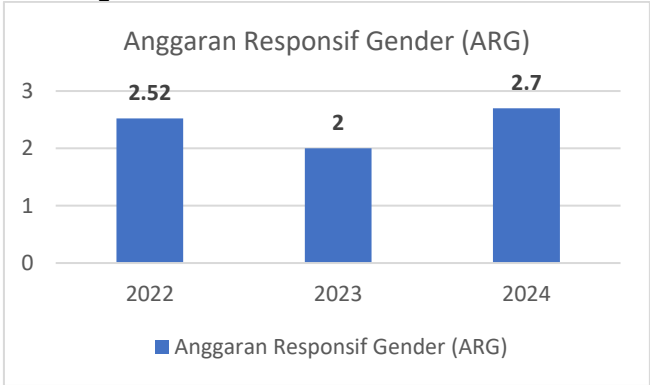
Tabel 2.11
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Perempuan
Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Malinau	70,15	70,15	73,55	52,50	57,83
2.	Bulungan	65,30	65,30	64,24	51,20	53,51
3.	Tana Tidung	60,10	60,10	59,50	50,80	58,41
4.	Nunukan	62,45	62,45	61,80	54,30	58,03
5.	Tarakan	66,80	66,80	68,30	55,60	44,00
6.	Kalimantan Utara	48,44	48,44	49,30	53,60	52,14

Data ini menunjukkan bahwa TPAK perempuan di Kalimantan Utara secara rata-rata berfluktuasi selama periode 2020–2024. Beberapa daerah menunjukkan kecenderungan menurun setelah 2022 lalu sebagian naik kembali di 2024. Secara provinsi, TPAK perempuan tahun 2020 sebesar 48,44% dan tahun 2024 sebesar 52,14%, artinya ada peningkatan 3,7 poin dalam lima tahun. Kabupaten/kota dengan TPAK relatif tinggi (Malinau, Tarakan, Bulungan, Nunukan) justru mengalami penurunan tajam pasca 2022. Daerah dengan TPAK rendah (Provinsi secara keseluruhan) justru menunjukkan peningkatan. Hal ini bisa menunjukkan adanya pergeseran peran ekonomi perempuan atau faktor ketidakstabilan pasar kerja di kabupaten/kota tertentu. TPAK perempuan di Kalimantan Utara berfluktuasi 2020–2024, dengan kecenderungan menurun tajam di beberapa kabupaten/kota, khususnya Tarakan dan Malinau. Namun, secara provinsi terdapat peningkatan TPAK sebesar 3,7 poin dalam 5 tahun terakhir. Diperlukan kebijakan afirmatif untuk menjaga keberlanjutan partisipasi perempuan di dunia kerja, terutama di daerah dengan penurunan signifikan.

3. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)

Gambar 2.7
Anggaran Responsif Gender Provinsi Kalimantan Utara



Anggaran Responsif Gender (ARG) mengacu pada proporsi anggaran yang dialokasikan untuk program atau kegiatan yang mendukung kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, terutama dalam konteks pembangunan daerah. Pada tahun 2022, Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan 2,52% dari anggaran total untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender. Angka ini menunjukkan adanya kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya integrasi gender dalam program-program pembangunan. Peningkatan ini kemungkinan terkait dengan implementasi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam sektor pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Anggaran responsif gender mengalami penurunan menjadi 2,00% pada tahun 2023. Penurunan ini bisa jadi dipengaruhi oleh perubahan prioritas anggaran akibat tantangan ekonomi, misalnya dampak dari pandemi COVID-19 atau kebutuhan mendesak lainnya seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Meskipun ada penurunan, 2,00% masih menunjukkan komitmen terhadap kebijakan berbasis gender, namun penting untuk menganalisis apakah penurunan ini berdampak pada program yang langsung menyentuh perempuan. Pada tahun 2024, anggaran responsif gender kembali meningkat menjadi 2,70%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa provinsi berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang mungkin berkaitan dengan upaya jangka panjang dalam mengurangi ketimpangan gender di berbagai sektor. Kenaikan anggaran ini juga mencerminkan pemulihan dan penguatan langkah-langkah yang mendukung kesetaraan gender, mengingat pentingnya perempuan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2023, secara keseluruhan, angka ARG menunjukkan stabilitas dan kecenderungan untuk meningkat di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya prioritas yang semakin besar terhadap keberlanjutan kebijakan responsif gender, terutama di tahun-tahun yang akan datang. Perubahan-perubahan ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk Perubahan prioritas kebijakan daerah dan Kebutuhan mendesak untuk investasi dalam Perempuan.

4. Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Penyelenggaraan KLA sejak tahap awal hingga akhir, harus mempertimbangkan dan memperhatikan pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi dari anak. Anak harus terlibat dan dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebab pembentukan KLA ini merupakan kepentingan anak, sehingga haknya dapat dipenuhi.

Tabel 2.12
Capaian Kab/Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Utara

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Malinau	Belum	Belum	Belum	Belum	Pratama
2.	Bulungan	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
3.	Tana Tidung	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
4.	Nunukan	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
5.	Tarakan	Belum	Belum	Pratama	Pratama	Madya

Capaian KLA Provinsi Kalimantan Utara dalam empat tahun mengalami peningkatan yang cukup . Pada tahun 2020 jumlah Kab/Kota yang telah mendapat predikat KLA adalah sejumlah 1 Kab/Kota dari 5 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan memiliki penambahan pada tahun 2022 Kota Tarakan yang mendapat predikat KLA. Capaian ini masih yang ditetapkan, yakni 40% di tahun 2023. Pada Tahun 2024 mengalami peningkatan predikat KLA pada Kabupaten Malinau dan predikat KLA untuk Kota Tarakan meningkat menjadi Madya.

Sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Berbagai persoalan sulitnya mewujudkan Kab/Kota Layak Anak di Provinsi Kalimantan Utara terjadi karena Lemahnya koordinasi OPD yang tergabung sebagai anggota Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan komitmen Kab/Kota masih lemah. Disamping itu, kualitas SDM (operator yang melakukan penginputan data) di masing-masing kab/kota juga masih rendah dan Kabupaten Tana Tidung secara kelembagaan belum memiliki Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak terhadap jumlah penduduk perempuan dan anak di suatu wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.

Rasio ini membantu untuk mengukur tingkat kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan, dan sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program perlindungan yang dijalankan oleh DP3A, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Tabel 2.13
Data Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Kalimantan Utara

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Korban (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Fisik	92	79	96	113	99
2.	Psikis	56	55	61	28	30
3.	Seksual	12	8	17	14	20
4.	Eksplorasi	0	0	0	0	0
5.	Trafficking	0	1	0	8	8
6.	Penelantaran	8	7	17	6	10
7.	Lainnya	3	6	8	13	5
Jumlah		171	156	199	182	172

Sumber : Simfoni PPA berdasarkan waktu input

Berdasarkan Tabel Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Kalimantan Utara dari 2020 hingga 2024 dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Fisik adalah jenis kekerasan yang paling banyak terjadi, dengan jumlah korban yang terus meningkat dari 2020 hingga 2023, meskipun ada sedikit penurunan pada 2024. Kekerasan Psikis menunjukkan penurunan signifikan pada 2023, namun jumlah korban tetap signifikan pada tahun-tahun lainnya. Kekerasan Seksual mengalami penurunan dari 2020 hingga 2023, dengan sedikit peningkatan pada 2024. Eksploitasi tidak tercatat sebagai masalah besar dengan jumlah korban yang tetap 0 di beberapa tahun. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, terutama dalam hal kekerasan fisik dan psikis, yang membutuhkan perhatian lebih dalam pencegahannya.



Tabel 2.14
Data Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Kalimantan Utara

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Korban (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Fisik	58	40	49	60	47
2.	Psikis	32	47	51	40	33
3.	Seksual	66	78	115	79	131
4.	Eksploritasi	0	3	6	3	7
5.	Trafficking	0	0	1	0	7
6.	Penelantaran	4	5	17	8	7
7.	Lainnya	3	7	10	14	5
Jumlah		163	180	249	204	237

Sumber : Simfoni PPA berdasarkan waktu input

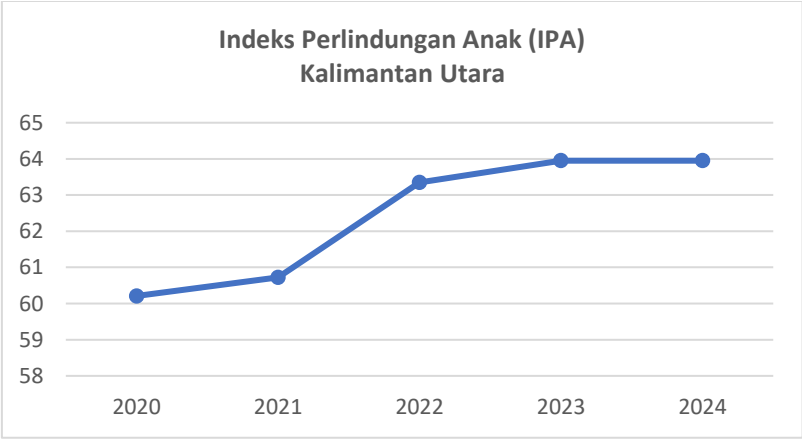
Berdasarkan Tabel Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Kalimantan Utara dari 2020 hingga 2024 dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Seksual adalah jenis kekerasan yang paling banyak meningkat, dengan jumlah korban terus bertambah setiap tahun, mencapai puncaknya pada 2024 dengan 131 korban. Kekerasan Fisik menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan pada 2023, tetapi menurun sedikit pada 2024. Kekerasan Psikis mengalami penurunan pada 2023 dan 2024 setelah meningkat pada tahun-tahun sebelumnya. Eksploitasi tetap menjadi masalah minoritas dengan jumlah korban yang relatif rendah. Secara keseluruhan, kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, menandakan perlunya perhatian lebih dalam pencegahan dan perlindungan anak

6. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kalimantan Utara

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur dan memantau kondisi perlindungan anak di suatu negara atau daerah. Indeks ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana negara atau wilayah tertentu telah memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi, penyalahgunaan, diskriminasi, dan kekerasan. IPA sering kali mencakup beberapa dimensi atau aspek yang berhubungan dengan kesejahteraan anak



Gambar 2.8
Tren Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kalimantan Utara



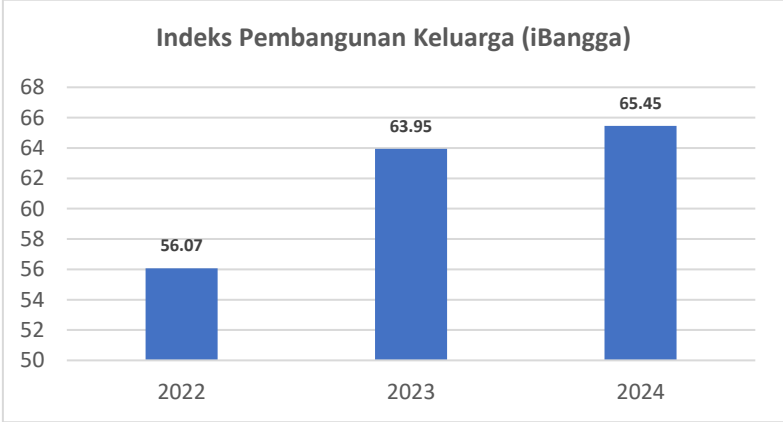
Dari tahun 2020 IPA mengalami kenaikan sebesar 60,21 di tahun 2021 menjadi 60,72. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 63,35. IPA terus menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 menjadi 63,95. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi perlindungan anak di Kalimantan Utara. Namun, peningkatan ini tergolong moderat, dengan kenaikan yang relatif stabil setiap tahunnya. Kenaikan IPA di Kalimantan Utara kemungkinan besar berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mendapatkan status KLA, seperti perbaikan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesejahteraan sosial anak. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersama dengan masyarakat, LSM, dan sektor swasta telah berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Namun, masih ada tantangan untuk memastikan bahwa semua daerah di Kalimantan Utara mencapai standar yang lebih tinggi dalam perlindungan anak.

B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) atau iBangga adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga di Indonesia. iBangga merupakan alat yang digunakan untuk menilai dan mengukur seberapa baik kondisi keluarga di berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi sosial. Tujuan dari iBangga adalah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan keluarga serta untuk memonitor perkembangan dan pencapaian yang terkait dengan pembangunan keluarga di tingkat desa hingga nasional. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) mengukur kualitas kehidupan keluarga melalui beberapa dimensi yang mencakup ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan.

Gambar 2.9
Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Provinsi Kalimantan Utara 2022 - 2024

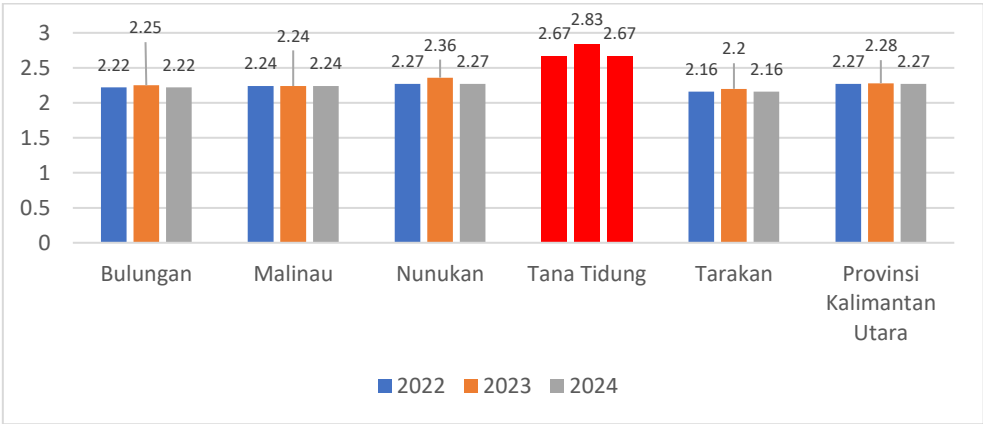


Pada tahun 2022, iBangga Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 56,07. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan keluarga di provinsi ini berada dalam kategori "berkembang", dengan nilai yang masih berada di rentang 40-70. Pada tahun 2023, nilai iBangga Provinsi Kalimantan Utara meningkat menjadi 63,95. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa keluarga di provinsi ini telah mengalami kemajuan dalam beberapa dimensi pembangunan keluarga. Kategori: Berkembang (Cukup Baik), tetapi mendekati kategori "Tangguh" (di atas 70). Peningkatan dari 56,07 pada 2022 menjadi 63,95 pada 2023 mencerminkan upaya yang lebih baik dalam memperbaiki kualitas kehidupan keluarga di Kalimantan Utara. Peningkatan ini bisa diartikan sebagai keberhasilan program-program terkait pembangunan keluarga yang lebih tepat sasaran, namun masih banyak ruang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju kategori "tangguh". Peningkatan yang terjadi harus didorong oleh kebijakan yang lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

2. Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total

Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah sebuah ukuran demografis yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang hidupnya jika ia menjalani pola kelahiran yang ada pada tahun tertentu. TFR dihitung berdasarkan jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita usia subur (biasanya antara usia 15 hingga 49 tahun) dalam suatu populasi pada periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. TFR sering digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat pertumbuhan populasi suatu negara atau wilayah. Secara umum, jika TFR lebih tinggi dari 2,1 anak per wanita, populasi cenderung tumbuh, sedangkan jika TFR lebih rendah, populasi cenderung menurun dalam jangka panjang (tidak mempertimbangkan migrasi).

Gambar 2.10
Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total
Provinsi Kalimantan Utara



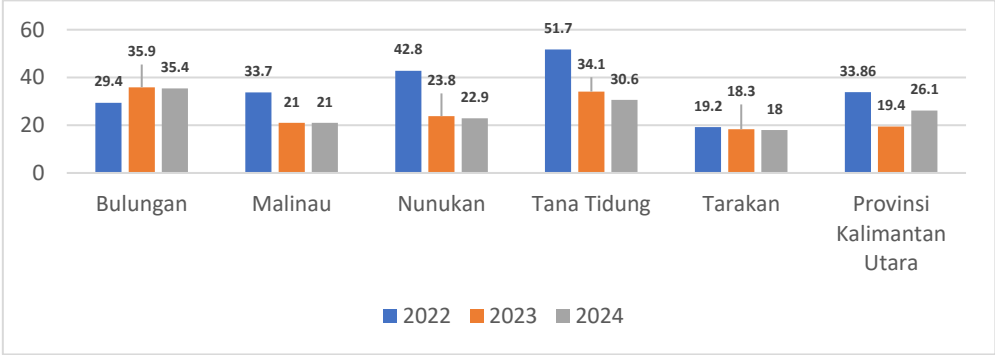
Dari data di atas, kita dapat melihat adanya penurunan TFR secara bertahap dari tahun 2022 ke 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur (15–49 tahun) di Kalimantan Utara menurun sedikit demi sedikit. Penurunan TFR yang konsisten ini bisa menandakan bahwa tingkat kelahiran di Kalimantan Utara sedang mengalami penurunan, yang mungkin mencerminkan perubahan dalam pola hidup dan kebijakan keluarga berencana yang lebih efektif. Penurunan TFR di Kalimantan Utara dapat membawa berbagai dampak positif, seperti peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, dalam konteks ekonomi, ini dapat menciptakan peluang untuk memaksimalkan potensi tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil, sambil meminimalkan tekanan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur. Namun, untuk meraih manfaat tersebut, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta mengantisipasi perubahan demografis yang dapat mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

3. Angka Kelahiran Spesifik Umur (ASFR)

ASFR (*Age-Specific Fertility Rate*) atau Angka Kelahiran Spesifik Umur adalah ukuran yang digunakan dalam demografi untuk menggambarkan tingkat kelahiran di suatu populasi berdasarkan kelompok usia tertentu. ASFR mengukur jumlah kelahiran hidup yang terjadi pada wanita dalam kelompok usia spesifik (misalnya usia 15-19 tahun, 20-24 tahun, dan seterusnya) per 1.000 wanita dalam kelompok usia tersebut selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).



Gambar 2.11
Angka Kelahiran Spesifik Umur (ASFR) 15-19 Tahun
Provinsi Kalimantan Utara

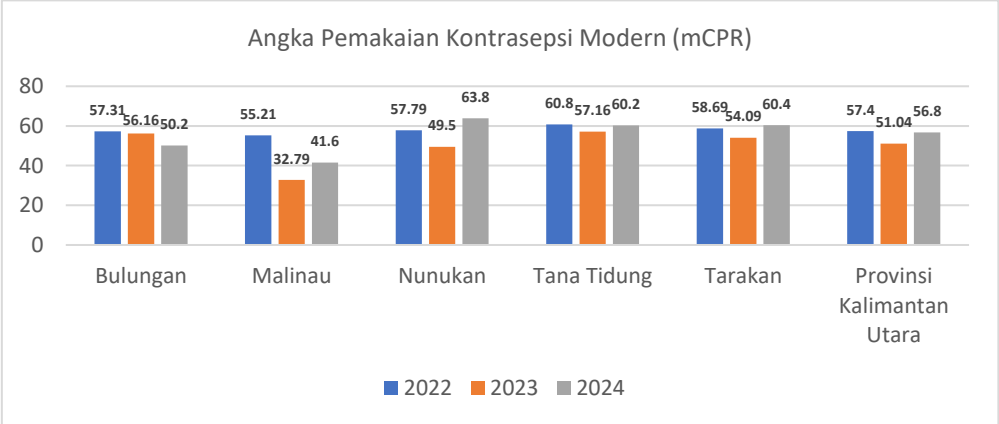


Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2023 (19.4) dibandingkan tahun 2022 (33.86), diikuti dengan sedikit peningkatan pada tahun 2024 (26.1). Penurunan yang tajam di tahun 2023 bisa mengindikasikan perubahan besar dalam kebijakan atau faktor eksternal lainnya yang memengaruhi tingkat kelahiran. Meskipun ada sedikit pemulihan pada tahun 2024, angka kelahiran masih lebih rendah daripada pada tahun 2022. Penurunan ASFR di hampir semua kabupaten/kota menunjukkan adanya keberhasilan dalam program keluarga berencana atau perubahan sosial-ekonomi yang berdampak pada pola kelahiran di Kalimantan Utara. Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung mencatatkan penurunan yang tajam, sementara Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan yang lebih moderat. Tana Tidung memiliki angka kelahiran yang paling tinggi pada 2022, tetapi penurunan yang cepat di tahun-tahun berikutnya menunjukkan perubahan besar yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan atau perubahan sosial yang kuat. Tarakan menunjukkan penurunan yang stabil, sementara Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi yang lebih besar. Penurunan ini memiliki dampak positif, seperti peningkatan kualitas hidup, lebih banyak perhatian pada kesehatan ibu dan anak, serta dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, jika dikelola dengan baik.

4. Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)

Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) atau Modern Contraceptive Prevalence Rate adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur persentase pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi modern dalam suatu populasi. Metode kontrasepsi modern mencakup alat kontrasepsi seperti pil KB, suntikan, implan, IUD (spiral), kondom, dan steriliasi.

Gambar 2.12
Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)
Provinsi Kalimantan Utara

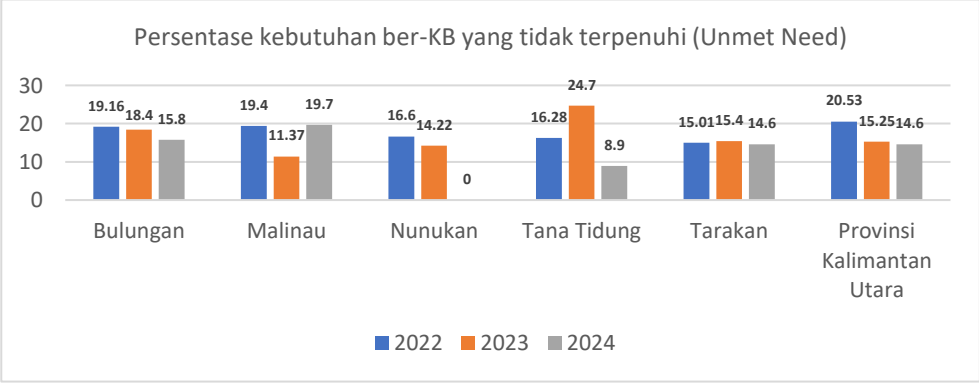


Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan pada 2023, diikuti dengan sedikit pemulihan pada 2024. Meskipun ada fluktuasi, angka mCPR untuk provinsi ini tetap relatif stabil, menunjukkan kesuksesan program keluarga berencana meskipun ada penurunan sementara. Malinau mengalami penurunan yang signifikan pada 2023, yang mungkin memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan akses dan pemahaman tentang kontrasepsi modern. Nunukan mengalami pemulihan yang signifikan pada 2024, yang menandakan adanya dampak positif dari kebijakan yang diterapkan. Tana Tidung, Tarakan, dan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan stabilitas atau sedikit pemulihan, yang mencerminkan ketahanan dalam penggunaan kontrasepsi modern meskipun ada penurunan pada beberapa tahun.

5. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda atau menghentikan kelahiran, tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi. Dengan kata lain, Unmet Need menunjukkan seberapa besar kesenjangan antara kebutuhan akan kontrasepsi dengan penggunaan kontrasepsi yang ada.

Gambar 2.13
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
Provinsi Kalimantan Utara



Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan yang stabil dalam unmet need dari

20.53% pada 2022 menjadi 14.6% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam pencapaian program keluarga berencana, beberapa kabupaten/kota, seperti Malinau dan Tana Tidung, masih memiliki tantangan dalam memenuhi kebutuhan kontrasepsi.

2.3.2. Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp)				Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp)				Ratio Realisasi				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	389,601,628	834,191,140	737,215,700	1,481,790,000	335,912,350	832,191,851	735,902,399	1,231,190,000	86.22%	99.76%	99.82%	83.09%	67,83	67,82
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	842,910,584	240,536,490	216,369,500	353,231,079	535,392,948	179,671,656	192,058,700	329,651,079	63.52%	74.70%	88.76%	93.32%	(6,09)	4,03
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	252,557,278	85,312,616	194,725,232	594,235,515	201,535,347.00	84,753,000	193,413,110	574,602,139	79.80%	99.34%	99.33%	96.70%	89,06	89,12
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	N/A	142,448,857	107,850,000	110,085,893	N/A	135,518,638	107,622,300	109,986,369	N/A	95.13%	99.79%	99.91%	(11,11)	(9,19)
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1,039,221,201.00	302,791,950	237,620,000	572,734,521	898,728,470.00	298,359,280	236,671,822	569,003,738	86.48%	98.54%	99.60%	99.35%	16,21	17,65
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	663,710,161.00	417,233,292	320,880,400	522,740,000	479,753,520.00	400,378,382	289,020,907	475,367,036	72.28%	95.96%	90.07%	90.94%	0,89	6,71
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	N/A	59,966,090	367,484,237	841,756,059	N/A	59,502,650	364,145,113	721,898,862	N/A	99.23%	99.09%	85.76%	320,94	305,11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,118,116,760.00	8,763,511,970	9,052,754,784	9,915,573,317	1,994,078,309.00	8,566,108,123	8,572,084,754	9,076,679,451	94.14%	97.75%	94.69%	91.54%	108,86	111,84
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	N/A	213,254,135	N/A	N/A	N/A	213,115,047	N/A	N/A	N/A	99.93%	N/A	N/A	N/A	N/A
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	405,541,953.00	18,211,000	N/A	N/A	375,948,863.00	18,211,000	N/A	N/A	92.70%	100%	N/A	N/A	(95,51)	(95,16)



Anggaran untuk tahun 2021 relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya untuk sebagian besar program. Beberapa program seperti "Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan" memiliki anggaran sebesar Rp 389.601.628.000,00. Program "Pengembangan Keluarga Berencana" memiliki anggaran sebesar Rp 405.541.953.000,00, yang juga mencatatkan angka yang cukup besar pada tahun tersebut. Pada tahun 2022, anggaran untuk beberapa program mengalami kenaikan, salah satunya adalah "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi" yang memiliki anggaran besar sebesar Rp 8.763.511.570.000,00. Program "Perlindungan Anak" juga mengalami kenaikan anggaran menjadi Rp 663.710.161.000,00. Pada tahun 2023, anggaran meningkat secara signifikan untuk beberapa program, termasuk "Program Perlindungan Perempuan" dan "Program Peningkatan Kualitas Keluarga." Anggaran untuk "Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan" naik menjadi Rp 734.215.700.000,00. Program "Pemenuhan Hak Anak (PHA)" juga mengalami kenaikan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp 237.620.000.000,00. Anggaran tahun 2024 menunjukkan angka tertinggi sepanjang periode yang tercatat untuk sebagian besar program. Program "Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan" misalnya, memiliki anggaran sebesar Rp 1.481.790.000,00, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Program "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi" juga memiliki anggaran yang sangat besar, Rp 9.915.573.317.000,00. Secara keseluruhan, anggaran setiap program mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang periode 2021 hingga 2024. Program-program yang mencatatkan anggaran besar pada tahun 2024 menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap peningkatan kinerja dan layanan. Rasio realisasi anggaran umumnya sangat baik, dengan banyak program mencapai hampir 100% pada tahun 2024. Namun, beberapa program, seperti "Program Perlindungan Perempuan" dan "Program Pemenuhan Hak Anak," mengalami sedikit penurunan rasio realisasi di tahun 2023. Tahun 2024 adalah puncak efisiensi penggunaan anggaran, dengan banyak program menunjukkan rasio realisasi lebih dari 90%. Beberapa program, seperti "Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan," mencapai rasio lebih dari 99%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat efisien.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PPPAPKB Provinsi Kalimantan Utara

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.16 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Pelayanan Pembinaan Pembentukan Sarana dan Prasarana Ramah Anak	5 Kab/Kota
2.	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Anak Korban Kekerasan dan Perempuan Korban Kekerasan
3.	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Pembinaan terhadap Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	Organisasi Perempuan
4.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sosialisasi dengan tema Stunting	Kelompok Masyarakat berdasarkan Usia (BKB, BKR, BKL)

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas/Badan/Sekretariat dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas PPPAPKB Provinsi Kalimantan Utara :

Tabel 2.17 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dinas Kesehatan	Pelayanan Ramah Anak di PUSKESMAS	Meningkatkan layanan Sarana Prasarana PUSKESMAS Ramah Anak
2.	Disdikbud	Pelayanan Ramah Anak di Sekolah	Meningkatkan layanan Sekolah Ramah Anak

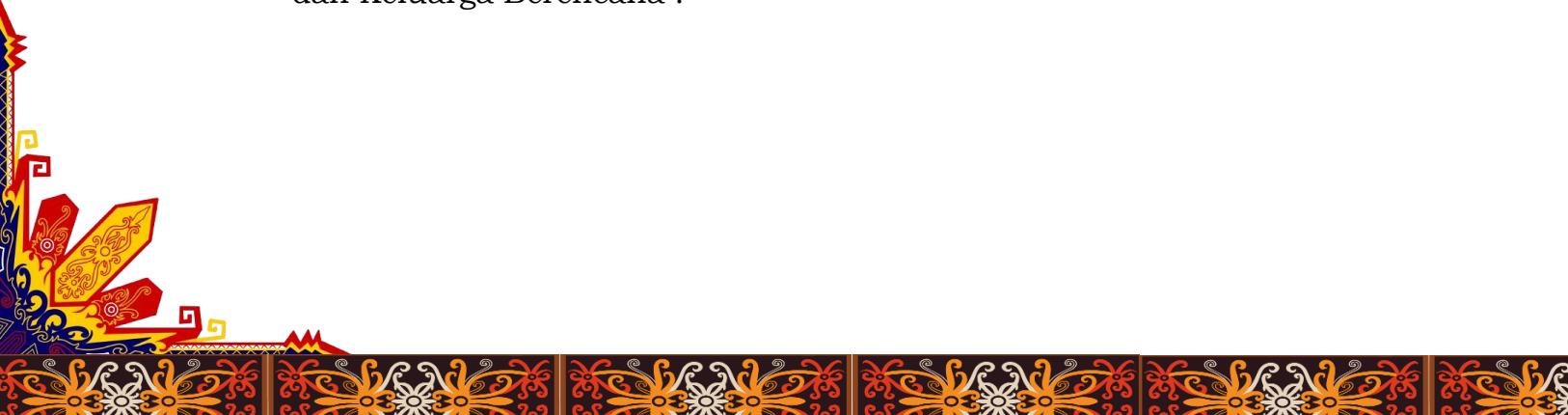
No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
3.	TPPKSP (Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan)	Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM	Meningkatkan Kapasitas SDM Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
4.	PPATBM (Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM	Meningkatkan Kapasitas SDM Masyarakat
5.	HIMPSI (Himpunan Psikologi)	Layanan pendampingan psikologis korban	Pemulihan dan Rehabilitasi bagi Korban kekerasan
6.	PUSPA	Peningkatan Kapasitas SDM pemberdayaan perempuan	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender
7.	Dinas Kesehatan, BKKBN, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan	Sebagai Narasumber kegiatan Sosialisasi	Meningkatkan Pengetahuan dan Kapasitas Masyarakat dalam Penurunan Stunting

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :



Tabel 2.18

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Tabel di atas mengilustrasikan kontribusi BUMD dalam mendukung kinerja Dinas PPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara secara lebih spesifik. Kontribusi yang diberikan oleh BUMD tidak hanya berupa penyediaan sumber daya atau dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk kemitraan yang strategis untuk mewujudkan keberhasilan program-program daerah. Melalui kerjasama yang efektif dengan BUMD, Dinas/Badan//Sekretariat dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat pencapaian target-target kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

2.7. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (jika ada)

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas PPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Dinas PPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

Tabel 2.19

Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Equator TV	Pelayanan Sosialiasi tentang Pemenuhan Hak Anak	Terpenuhinya Hak-hak Anak
2.	LBH Rumah Hukum Jaya Wardana	Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan	Layanan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
3.	Yayasan Bening Hati	Pendampingan pemulihan psikologis	Layanan Pemulihan Psikologis Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
4.	POLRI	Pendampingan Penanganan secara Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kekerasan	Layanan penjangkauan kasus
5.	SKALA	Penguatan Kapasitas Jaringan Masyarakat Sipil dalam Pengarusutamaan Gender dan GEDSI	Layanan Pengarusutamaan Gender untuk Pemberdayaan Perempuan

2.8. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.20
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Utara

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Adanya ketimpangan gender di bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan	Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan	a. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota b. Kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik c. Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender d. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			e. Belum optimalnya pelaksanaan peformulaan PUG dan sistem dalam pelaksanaan kebijakan.
2.	Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan Anggaran Responsif Gender	a. Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung b. Sebagian besar perangkat daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah	a. Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappedalitbang, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai gender machinery di daerah belum optimal b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG, PPRG untuk ARG
3.	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi	a. Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak b. Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko c. Belum optimalnya kualitas layanan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak d. SDM petugas kurang e. Fasilitas pelayanan minim
4.	Belum optimalnya layanan UPTD PPA	Kompetensi SDM dan Sarana Kurang Mendukung	a. Kurangnya sumber daya manusia yang bertugas dalam memberikan pelayanan terhadap korban b. Sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan klien masih belum memadai c. Kurangnya dukungan anggaran untuk mendukung proses pelaksanaan layanan bagi korban (sebagian besar hanya bergantung pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik)
5.	Belum optimalnya penyelenggaraan Kab/Kota Layak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator Kabupaten/ kota Layak Anak dengan capaian indikator pemenuhan hak anak >500	a. Kurangnya komitmen OPD yang tergabung sebagai Gugus Tugas KLA sehingga pelaksanaan menjadi lambat b. Lemahnya koordinasi OPD yang tergabung sebagai anggota Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat Kabupaten/Kota c. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas yang bertugas sebagai operator dalam penginputan Evaluasi Mandiri sebagai kelengkapan administrasi indikator KLA
6.	Perkawinan Usia Anak Masih Tinggi	Peran Kelembagaan masyarakat dalam membantu	a. Belum optimalnya peran lintas pihak dalam melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		pemerintah belum optimal	b. Praktek budaya yang kurang mendukung pencegahan perkawinan anak c.Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan usia anak
7.	Stunting pada Anak	Masih tingginya prevalensi <i>stunting</i>	a.Minimnya pengetahuan dan pemahaman keluarga tentang <i>stunting</i> b. Praktek pengasuhan yang kurang baik
8.	Belum optimalnya upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, keluarga berencana dan keluarga berkualitas	Angka TFR (<i>Total Fertility Rate</i>) di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih dibawah Nasional	a.Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP b. Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE c.Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan kabupaten/kota d. Belum terintegrasinya program kependudukan di SMA/SMK sehingga Program KKBPK kurang optimal e.Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana f. Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.9. **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang ingin diwujudkan pada periode 2025 -2029 adalah :

VISI :
” *Terwujudnya Fondasi Transofrmasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.*”

- MISI :**
- 1) *Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan*
 - 2) *Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan*
 - 3) *Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif*
 - 4) *Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah sebagai Berandan Depan NKRI*

- 5) *Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi*
- 6) *Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan*
- 7) *Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan*
- 8) *Mewujudkan Kesisambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas*

Mengacu pada Visi dan Misi di atas, sesuai dengan tugas fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara merupakan lembaga yang mempunyai peran dan fungsi strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan sumberdaya manusia yang berkeadilan gender sesuai dengan misi pertama yakni “ Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan” dengan tujuan ” Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Beranda Depan NKRI ”dengan sasaran : “ Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis.”

2.10. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis

Mengacu Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2017— 2037, sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi DP3AP2K Provinsi Kalimantan Utara tidak ada faktor- faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah apabila ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang. Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.



2.11. Penentuan Isu – isu strategis

Tabel 2.21
Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), berikut adalah proyeksi penduduk Kaltara untuk periode 2020–2035. Usia 15–64 tahun (Usia Produktif): Sekitar 65% dari total penduduk. 2. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 3. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi 4. SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk mencatat dan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh Indonesia.	1. Adanya ketimpangan gender di bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan 2. Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan Anggaran Responsif Gender 3. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak 4. Belum optimalnya layanan UPTD PPA 5. Belum optimalnya penyelenggaraan Kab/Kota Layak Anak 6. Perkawinan Usia Anak Masih Tinggi 7. Stunting pada Anak 8. Belum optimalnya upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, keluarga berencana dan keluarga berkualitas	SDGs Tujuan : 1. Tanpa Kemiskinan SDGs Tujuan : 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera SDGs Tujuan : 5. Kesetaraan Gender SDGs Tujuan : 10. Berkurangnya Kesenjangan SDGs Tujuan : 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	SDGs Tujuan : 1. Tanpa Kemiskinan SDGs Tujuan : 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera SDGs Tujuan : 5. Kesetaraan Gender SDGs Tujuan : 10. Berkurangnya Kesenjangan SDGs Tujuan : 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	a. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia b. Rendahnya Produktivitas c. Kurangnya akses dan kualitas layanan KB, terutama MKJP d. Kurangnya luasnya pelayanan KB di wilayah 3T dan daerah dengan TFR tinggi e. Masih lemahnya kolaborasi lintas sektor dan reformasi sistem pendataan akseptor KB f. Belum adanya digitalisasi dan integrasi layanan KB melalui platform berbasis data keluarga	a. Belum optimalnya kualitas SDM dan Kohesivitas masyarakat b. Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama c. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara. d. Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta sarana pengembangan talenta tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia.	a. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan b. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan c. Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kualitas keluarga berencana dan kualitas keluarga sejahtera

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Provinsi Kalimantan Utara yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan ”

Adapun misi Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif;
4. Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah sebagai Beranda Depan NKRI;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
7. Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas.

Mengacu pada RPJMD Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara selaras dengan **Misi ke-1** yaitu “Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan” dengan Tujuan Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Beranda Depan NKRI , adapun hubungan RPJMD dan RENSTRA DPPPAPKB Provinsi Kalimantan Utara dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Masyarakat Inklusif dan Harmonis	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga		Indeks Ketimpangan Gender	0,418	0,415	0,410	0,395	0,388	0,376	0,370	
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (Nilai)	700	710-710	720-720	730-730	740-740	750-750	760-760	
		Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%)	57:57	57:57	56:56	55:55	54:54	53:53	52:52	
			Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%)	7,41:7,41	7,30:7,30	7,19:7,19	7,10:7,10	6,90:6,90	6,75:6,75	6,60:6,60	
		Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59,53	59,53	59,78	60,04	60,29	60,54	60,80	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk, Kualitas Keluarga Berencana dan Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	65,45	67,45	68,55	69,95	71,26	72,49	73,63	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,50	83,00	84,00	85,20	87,40	90,10	94,10	



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/sub kegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi DPPAPPKB, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2
Penentuan Strategi DPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Adanya ketimpangan gender di bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Melakukan pembinaan pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi
2	Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan Anggaran Responsif Gender	Meningkatnya pemahaman perangkat daerah mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah	1. Membentuk focal point Pengarusutamaan Gender pada seluruh perangkat daerah 2. Melakukan pendampingan pada perangkat daerah dalam menyusun <i>Gender Analysis Budget</i>
3	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Menurunnya Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi 2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi
4	Belum optimalnya layanan UPTD PPA	Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan perlindungan dan Sarana Prasarana pendukung layanan perlindungan	1. Peningkatan kualitas SDM bersertifikat pada unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak 2. Supervisi dalam pembentukan UPTD PPA di Kabupaten/Kota
5	Belum optimalnya penyelenggaraan	Meningkatnya pemenuhan indikator	1. Peningkatan komitmen Gugus Tugas Kab/Kota Layak Anak

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
	Kab/Kota Layak Anak	Kabupaten/Kota layak anak di Provinsi Kalimantan Utara	2. Peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pembentukan Kab/Kota Layak Anak 3. Penyusunan kebijakan yang mendukung Kab/Kota Layak Anak
6	Perkawinan Usia Anak Masih Tinggi	Menurunnya angka perkawinan anak	1. Optimalisasi peran lintas pihak dalam melakukan pencegahan perkawinan anak 2. Peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi
7	Masih tingginya angka <i>Stunting</i>	Menurunnya angka prevalensi <i>stunting</i>	1. Penyusunan kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i> 2. Penyusunan rencana aksi daerah percepatan penurunan <i>stunting</i> 3. Peningkatan efektifitas sosialisasi pencegahan <i>stunting</i>
8	Belum optimalnya upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, keluarga berencana dan keluarga berkualitas	Terkendalinya Angka TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	1. Penyusunan Dokumen <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan 2. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal

3.2.2 Arah Kebijakan Kepala Daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.3
Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi	Misi 2 RPJMD: • Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat • Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan • Percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif • Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) • Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan • Perkuatan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif • Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi daerah • Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka • Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi 3TP • Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan	1. Membentuk focal poin Pengarusutamaan Gender pada seluruh perangkat daerah 2. Melakukan pendampingan pada perangkat daerah dalam menyusun <i>Gender Analysis Budget</i>	a. Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan belum menjadi <i>mainstream</i> bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota b. Kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik c. Belum optimalnya pelaksanaan PUG dalam pelaksanaan kebijakan d. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam menentukan Anggaran Responsif Gender	1. Mendorong pembentukan kebijakan pengarusutamaan gender 2. Melakukan kerjasama dengan pihak lintas sektoral dalam meningkatkan kapasitas SDM pengolah data Anggaran Responsif Gender 3. Menyusun regulasi penguatan Anggaran Responsif Gender	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
2	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota		1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi 2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	a. Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan b. Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan c. Belum optimalnya kualitas layanan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Memperkuat pemahaman berbagai unsur pencegahan kekerasan terhadap perempuan 2. Meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pencegahan	
3	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota		1. Peningkatan kualitas SDM bersertifikat pada unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak 2. Supervisi dalam pembentukan UPTD PPA di Kabupaten/Kota daerah provinsi 2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang	a. Kurangnya SDM terlatih yang bertugas dalam memberikan pelayanan terhadap korban b. Sarana dan prasarana yang mendukung tindak lanjut pelayanan	1. Advokasi dalam pembentukan UPTD PPA di Kab/Kota 2. Mendorong terbentuknya sarana dan prasarana tindak lanjut penanganan kekerasan 3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	bagi korban yang masih minim c. Belum terbentuknya UPTD PPA di Kab/Kota d. Kurangnya dukungan anggaran untuk mendukung proses pelaksanaan layanan bagi korban (sebagian besar bergantung pada DAK Non Fisik)	terlatih dalam melakukan penanganan kekerasan	
4	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan kapasitas terhadap perempuan kepala keluarga maupun wirausaha perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan untuk mewujudkan kesetaraan gender	Masih kurangnya pembinaan terhadap sasaran peningkatan kualitas keluarga yang disebabkan minimnya dukungan anggaran dan kondisi geografis dan bentuk demografi yang menyulitkan pelaksanaan pembinaan	Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
5	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi		Koordinasi lintas sektor pengelola Data dalam menganalisa data gender dan anak	a. Belum tersedianya pedoman pengolahan dan analisis data profil gender dan anak b. Belum adanya komitmen dari kab/kota dalam melaksanakan penyajian analisis data gender dan anak	Mengoptimalkan kerjasama lintas sektor wali data dalam menganalisa data gender dan anak	
6	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi		1. Peningkatan komitmen Gugus Tugas Kab/Kota Layak Anak 2. Peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pembentukan Kab/Kota Layak Anak 3. Penyusunan kebijakan yang mendukung Kab/Kota Layak Anak	a. Masih rendahnya komitmen dari stakeholder di Kab/Kota dalam mendukung Kab/Kota Layak Anak b. Belum tersedianya regulasi/kebijakan yang mendukung kualifikasi kab/kota layak anak di kab/kota	Mendukung penyusunan kebijakan yang mendukung implementasi pemenuhan hak anak	
7	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup		Pembentukan gugus tugas pencegahan	Masih rendahnya pemahaman	Mengoptimalkan pencegahan kekerasan terhadap	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota		kekerasan pada anak lintas sektoral	masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan masih menganggap kekerasan adalah hal yang tabu	seluruh lapisan masyarakat	
8	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi		1. Penyusunan kebijakan pembentukan UPTD PPA di Kab/Kota 2. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan perlindungan khusus anak	Kurangnya komitmen kab/kota dalam membentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Mendukung penyusunan kebijakan perlindungan di kab/kota	
9	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk		Penyusunan Dokumen <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan	Belum tersedianya Dokumen <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan	Meningkatkan kerjasama dalam melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	
10	Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal		Peningkatan pemahaman KIE pengendalian penduduk dan KB pada Bina Keluarga Remaja, Lansia, Balita	Rendahnya partisipasi anggota masyarakat dalam pembinaan advokasi, komunikasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB	Mengembangkan pelaksanaan advokasi pengendalian penduduk terhadap seluruh lapisan masyarakat	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
11	Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Peningkatan kapasitas UPPKA dalam meningkatkan ketahanan keluarga	Keterbatasan Sumberdaya terlatih dalam melaksanakan peningkatan kapasitas UPPKA	Merumuskan kebijakan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga	



3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang :

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Kebijakan yang mendukung peningkatan Pengarusutamaan Gender	Penguatan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan	Optimalisasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender	Perwujudan Provinsi Layak Anak sebagai hasil implementasi Pembentukan Kab/Kota Layak Anak



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Dinas PPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas/Badan//Sekretariat, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.



Tabel 4.1
Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					17.012.256.827,00		23.560.854.926,30		25.225.521.065,60		27.451.000.000,00		31.616.700.000,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12.612.256.827,00		15.443.014.655,76		15.957.758.055,54		17.176.000.000,00		18.434.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	100	100	100	11.263.756.827,00	100	13.046.462.303,79	100	13.437.736.816,24	100	14.576.000.000,00	100	15.834.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	100	100	100	1.348.500.000,00	100	2.396.552.351,97	100	2.520.021.239,30	100	2.600.000.000,00	100	2.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					950.000.000,00		950.000.000,00		1.047.000.000,00		1.650.000.000,00		1.950.000.000,00	
Meningkatnya Pengarustamaan Gender Bagi Perangkat Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	3,21	3,29	3,50	950.000.000,00	3,77	950.000.000,00	3,90	1.047.000.000,00	4,20	1.650.000.000,00	4,50	1.950.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					940.000.000,00		2.334.814.987,66		1.980.863.717,12		2.450.000.000,00		3.700.000.000,00	
Menigkatnya Kualitas Layanan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan	100	100	100	500.000.000,00	100	1.781.764.444,90	100	1.399.320.354,20	100	1.850.000.000,00	100	3.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Komprehensif (%)													
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%)	57:57	57:57	56:56	440.000.000,00	55:55	553.050.542,76	54:54	581.543.362,92	53:53	600.000.000,00	52:52	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					200.000.000,00		609.051.896,79		754.544.424,88		850.000.000,00		850.000.000,00	
Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	52,14	53,60	54,20	200.000.000,00	55,00	609.051.896,79	55,75	754.544.424,88	56,50	850.000.000,00	57,00	850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					550.000.000,00		641.313.178,45		870.929.203,64		850.000.000,00		907.700.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	550.000.000,00	100	641.313.178,45	100	870.929.203,64	100	850.000.000,00	100	907.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					750.000.000,00		836.969.767,68		1.811.246.902,93		925.000.000,00		1.975.000.000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA (Persentase)	40	40	60	750.000.000,00	60	836.969.767,68	80	1.811.246.902,93	80	925.000.000,00	100	1.975.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					1.010.000.000,00		2.745.690.439,96		2.803.178.761,49		3.550.000.000,00		3.800.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Anak Korban Kekerasan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	550.000.000,00	100	2.100.464.806,74	100	2.124.711.504,75	100	2.850.000.000,00	100	3.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%)	57:57	57:57	56:56		55:55		54:54		53:53		52:52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%)	10.7:10.7	10:10	9.5:9.5	460.000.000,00	8.5:8.5	645.225.633,22	8:8	678.467.256,74	7.5:7.5	700.000.000,00	7:7	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					1.200.000.000,00		2.657.427.804,28		3.095.640.708,40		3.200.000.000,00		3.250.000.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					500.000.000,00		1.013.925.995,07		1.163.162.832,01		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	
Terkendalinya angka kelahiran total	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,27	2,25	2,24	500.000.000,00	2,22	1.013.925.995,07	2,21	1.163.162.832,01	2,20	1.100.000.000,00	2,18	1.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					350.000.000,00		645.225.633,22		775.467.256,74		800.000.000,00		850.000.000,00	
Meningkatnya akseptor KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))	67,00	68,00	69,20	350.000.000,00	70,00	645.225.633,22	71,00	775.467.256,74	71,50	800.000.000,00	72,00	850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					350.000.000,00		998.276.175,99		1.157.010.619,65		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-	26.10-26.10	25.67-25.67	25.25-25.25	350.000.000,00	24.85-24.85	998.276.175,99	24.46-24.46	1.157.010.619,65	24.09-24.09	1.300.000.000,00	23.40-23.40	1.300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)													Keluarga Berencana
TOTAL KESELURUHAN					18,212,256,827.00		26,218,282,730.58		28,321,161,774.00		30,651,000,000.00		34,866,700,000.00	

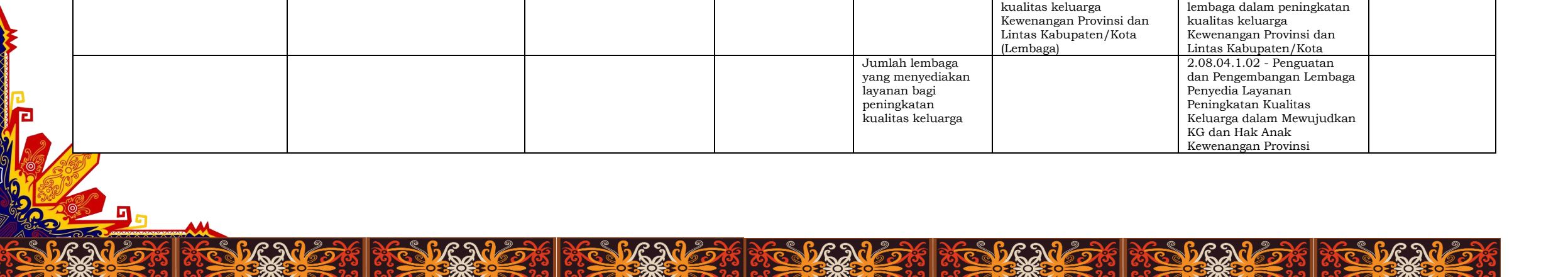


Tabel 4.2
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
Terwujudnya masyarakat inklusif dan harmonis	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Kualitas Keluarga				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan			Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender bagi Perangkat Daerah		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Jumlah dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG		2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.1.01.0005 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.02.1.01.0010 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
					jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
				Jumlah kader parpol/organisasi perempuan yang dibina		2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.1.02.0005 - Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.1.02.0009 - peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
				Jumlah lembaga PUG yang dibina		2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.1.03.0008 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Jumlah Keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga		2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.04.1.01.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.1.01.0005 - penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
				Jumlah lembaga yang menyediakan layanan bagi peningkatan kualitas keluarga		2.08.04.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.04.1.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.1.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah		2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.1.03.0005 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		Menurunya Kekerasan Perempuan dan Anak			rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%)		
					Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap Perempuan Korban Kekerasan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Jumlah kasus kekerasan perempuan		2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	2.08.03.1.01.0004 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (laporan)	2.08.03.1.01.0005 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	2.08.03.1.01.0006 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang diberikan penguatan dan pendampingan		2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	2.08.03.1.03.0006 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	2.08.03.1.03.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	
					jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.03.1.03.0008 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	

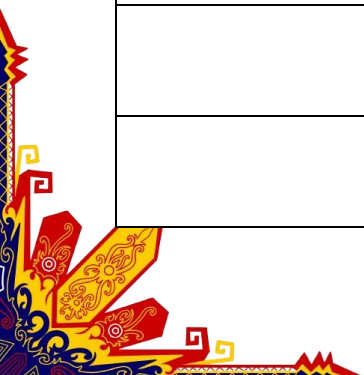
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.03.1.03.0009 - Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Jumlah dokumen yang berisi data gender dan anak		2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	2.08.05.1.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.1.01.0005 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	
				Jumlah dokumen yang berisi data Simfoni PPPA		2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	2.08.05.1.01.0003 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Anak Korban Kekerasan		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Rasio dan persentase kekerasan terhadap anak		2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Orang)	2.08.07.1.01.0006 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.07.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	2.08.07.1.01.0008 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.07.1.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.08.07.1.01.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
				Jumlah lembaga layanan bagi anak yang diberikan penguatan dan pengembangan		2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.07.1.03.0006 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	2.08.07.1.03.0009 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	



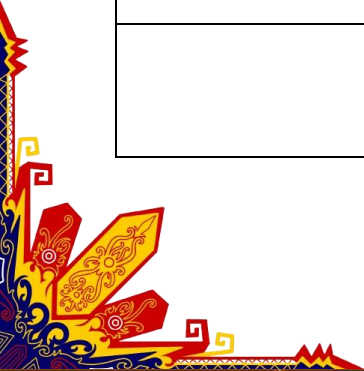
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Lembaga)	2.08.07.1.03.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	
					jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	2.08.07.1.03.0011 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.07.1.03.0012 - Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Laporan)	2.08.07.1.03.0013 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	
		Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)		
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak		Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA (Persentase)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Jumlah lembaga PHA		2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.06.1.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	2.08.06.1.01.0006 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kewenangan Provinsi (Orang)	Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.08.06.1.01.0008 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
				Jumlah lembaga penyedia layanan		2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	
					Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.06.1.02.0008 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.06.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
					jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.06.1.02.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk, Kualitas Keluarga Berencana dan Kualitas Keluarga Sejahtera			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)		
			Meningkatnya Pengendalian Angka Kelahiran Total		TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi		2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
					Jumlah fasilitasi provinsi dalam penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Kab/Kota)	2.14.02.1.01.0014 - Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	2.14.02.1.01.0021 - Advokasi dan Sosialisasi GDPK	
					Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dokumen)	2.14.02.1.01.0022 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	
					Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain (Daerah)	2.14.02.1.01.0024 - Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	
			Meningkatnya Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Jumlah Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan	2.14.03.1.01.0007 - Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	2.14.03.1.01.0009 - Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	
				Jumlah Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Organisasi)	2.14.03.1.02.0004 - Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	
			Menurunnya Angka Kelahiran Remaja		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Jumlah Pembangunan Ketahan Keluarga yang dibina		2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	2.14.04.1.01.0016 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
					Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja (Daerah)	2.14.04.1.01.0020 - Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Daerah)	2.14.04.1.01.0027 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
					Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Laporan)	2.14.04.1.01.0028 - Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	
				Jumlah Kualitas Keluarga Sejahtera		2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Laporan)	2.14.04.1.02.0007 - Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) (Laporan)	2.14.04.1.02.0010 - Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Laporan)	2.14.04.1.02.0011 - Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	

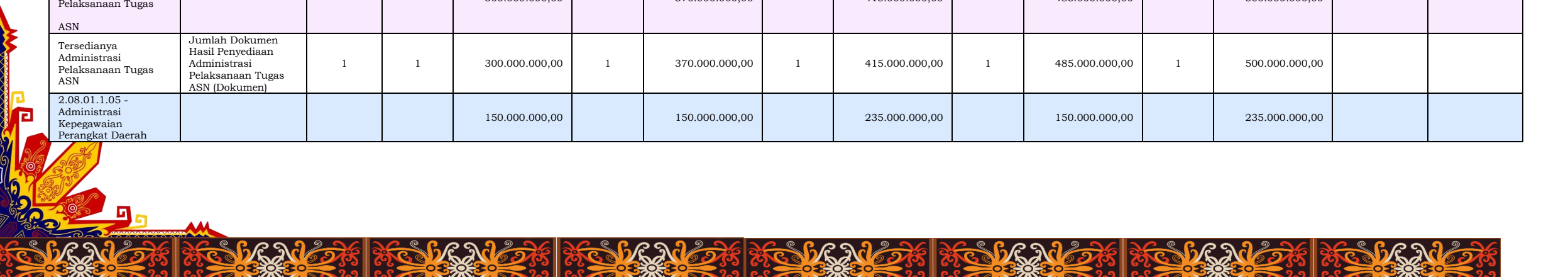
Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya.



Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				17.012.256.827,00		23.560.854.926,30		25.225.521.065,60		27.451.000.000,00		31.616.700.000,00		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.612.256.827,00		15.443.014.655,76		15.957.758.055,54		17.176.000.000,00		18.434.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	100	100	11.263.756.827,00	100	13.046.462.303,79	100	13.437.736.816,24	100	14.576.000.000,00	100	15.834.000.000,00	2.08.2.14.0.00. 02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		350.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	1	350.000.000,00		

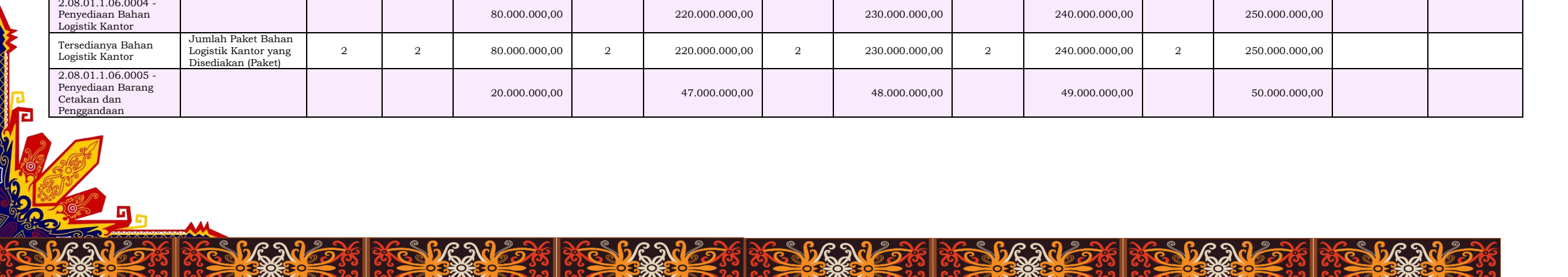
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
2.08.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		250.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			0,00		0,00		0,00		0,00	1	250.000.000,00		
2.08.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.700.000.000,00		10.220.000.000,00		10.815.000.000,00		11.304.000.000,00		11.921.000.000,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	14	14	9.700.000.000,00	14	10.220.000.000,00	14	10.815.000.000,00	14	11.304.000.000,00	14	11.921.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.400.000.000,00		9.850.000.000,00		10.400.000.000,00		10.819.000.000,00		11.421.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	14	14	9.400.000.000,00	14	9.850.000.000,00	14	10.400.000.000,00	14	10.819.000.000,00	14	11.421.000.000,00		
2.08.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				300.000.000,00		370.000.000,00		415.000.000,00		485.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	370.000.000,00	1	415.000.000,00	1	485.000.000,00	1	500.000.000,00		
2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		235.000.000,00		150.000.000,00		235.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi kepegawaian yang sesuai standar peraturan yang berlaku	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	235.000.000,00	5	150.000.000,00	5	235.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	55		0		60		0		60			
2.08.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000,00		0,00		85.000.000,00		0,00		85.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	55	50.000.000,00	0	0,00	60	85.000.000,00	0	0,00	60	85.000.000,00		
2.08.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	100.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		
2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				697.756.827,00		1.066.462.303,79		1.182.736.816,24		1.292.000.000,00		1.333.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	697.756.827,00	1	1.066.462.303,79	1	1.182.736.816,24	1	1.292.000.000,00	1	1.333.000.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			



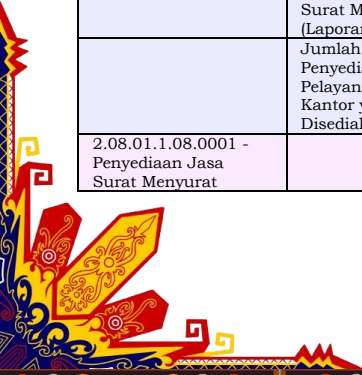
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5	5.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00		
2.08.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	10.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
2.08.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
2.08.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	80.000.000,00	2	220.000.000,00	2	230.000.000,00	2	240.000.000,00	2	250.000.000,00		
2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000,00		47.000.000,00		48.000.000,00		49.000.000,00		50.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	47.000.000,00	1	48.000.000,00	1	49.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				575.756.827,00		756.462.303,79		851.736.816,24		950.000.000,00		980.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	12	575.756.827,00	12	756.462.303,79	12	851.736.816,24	12	950.000.000,00	12	980.000.000,00		
2.08.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				50.000.000,00		850.000.000,00		400.000.000,00		750.000.000,00		1.000.000.000,00		
Urusan Pemerintah Daerah														
Pengadaan barang yang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai standar regulasi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	50.000.000,00	1	850.000.000,00	3	400.000.000,00	0	750.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0		3		0		3		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		3		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		3		5		5		4		2			
2.08.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas				0,00		0,00		0,00		450.000.000,00		400.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	450.000.000,00	1	400.000.000,00		
2.08.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		500.000.000,00		150.000.000,00		0,00		500.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	500.000.000,00	3	150.000.000,00	0	0,00	1	500.000.000,00		
2.08.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	3	100.000.000,00	0	0,00	3	100.000.000,00	0	0,00		
2.08.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		3	50.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	4	200.000.000,00	2	100.000.000,00		
2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				258.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	258.000.000,00	12	260.000.000,00	12	260.000.000,00	12	510.000.000,00	12	510.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.08.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

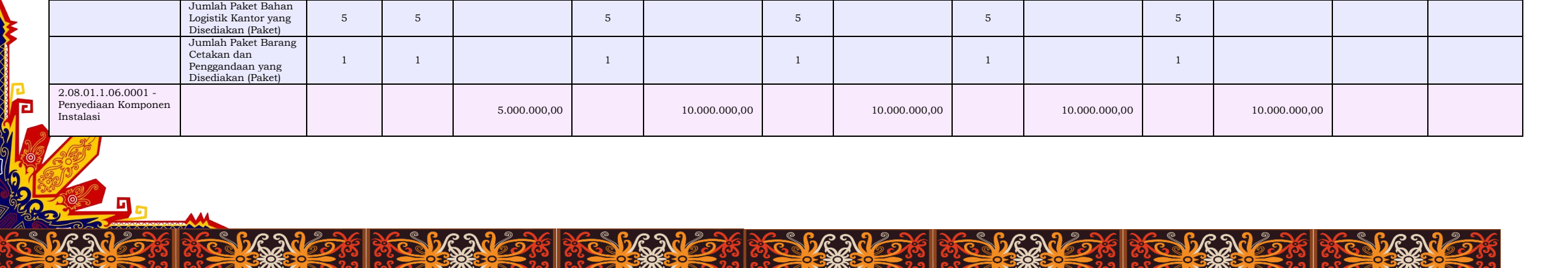


BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				308.000.000,00		400.000.000,00		445.000.000,00		470.000.000,00		485.000.000,00		
BMD yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	4	308.000.000,00	10	400.000.000,00	14	445.000.000,00	16	470.000.000,00	16	485.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5		5		6		6		6			
2.08.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				150.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		

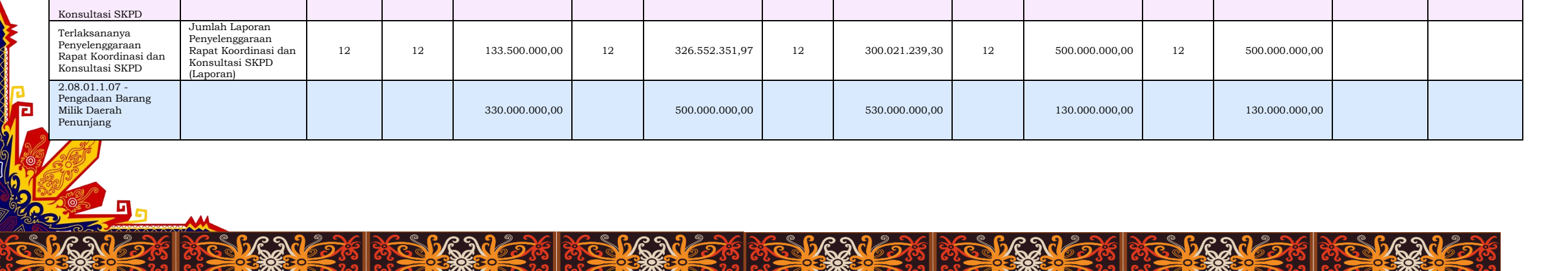


BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	150.000.000,00	5	170.000.000,00	6	190.000.000,00	6	190.000.000,00	6	195.000.000,00		
2.08.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	100.000.000,00	4	150.000.000,00	4	170.000.000,00	4	190.000.000,00	4	200.000.000,00		
2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	4	58.000.000,00	10	80.000.000,00	14	85.000.000,00	16	90.000.000,00	16	90.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	100	100	1.348.500.000,00	100	2.396.552.351,97	100	2.520.021.239,30	100	2.600.000.000,00	100	2.600.000.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8	12	100.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
2.08.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8	12	100.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	7	50.000.000,00	7	100.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00		
2.08.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	7	50.000.000,00	7	100.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00		
2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				358.500.000,00		836.552.351,97		810.021.239,30		1.210.000.000,00		1.210.000.000,00		
Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	358.500.000,00	1	836.552.351,97	1	810.021.239,30	1	1.210.000.000,00	1	1.210.000.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.08.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	50.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
2.08.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.08.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	100.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00		
2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				133.500.000,00		326.552.351,97		300.021.239,30		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	133.500.000,00	12	326.552.351,97	12	300.021.239,30	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		
2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				330.000.000,00		500.000.000,00		530.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		



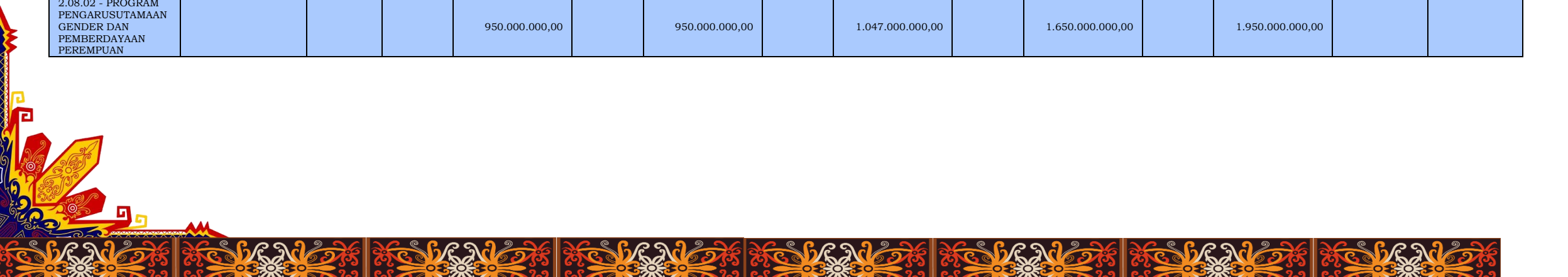
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Urusan Pemerintah Daerah														
Jumlah BMD yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	330.000.000,00	1	500.000.000,00	1	530.000.000,00	0	130.000.000,00	0	130.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4		4		4		4		4			
2.08.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.08.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	20.000.000,00	4	50.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00		
2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				255.000.000,00		380.000.000,00		450.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		
Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	255.000.000,00	12	380.000.000,00	12	450.000.000,00	12	480.000.000,00	12	480.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12	12		12		12		12		12			



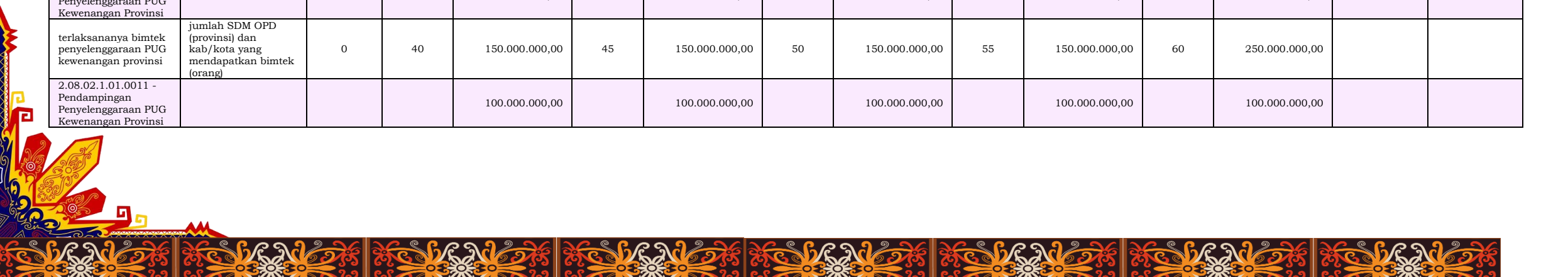
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kantor yang Disediakan (Laporan)													
2.08.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00		
2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000,00		300.000.000,00		370.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	370.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00		
2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				255.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		
Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	2	255.000.000,00	2	380.000.000,00	2	380.000.000,00	2	380.000.000,00	2	380.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	6		8		8		8		8			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12	15		15		15		15		15			



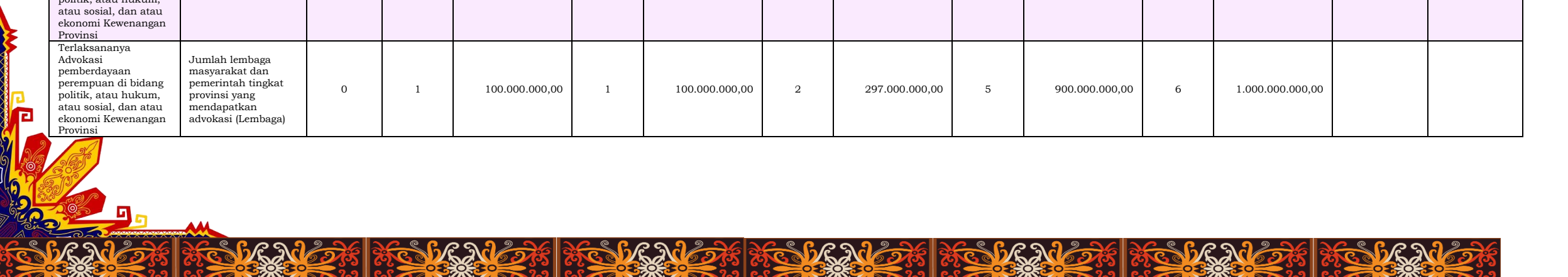
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Dipelihara (Unit)													
2.08.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	6	100.000.000,00	8	150.000.000,00	8	150.000.000,00	8	150.000.000,00	8	150.000.000,00		
2.08.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	15	15.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00		
2.08.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				130.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	130.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				950.000.000,00		950.000.000,00		1.047.000.000,00		1.650.000.000,00		1.950.000.000,00		



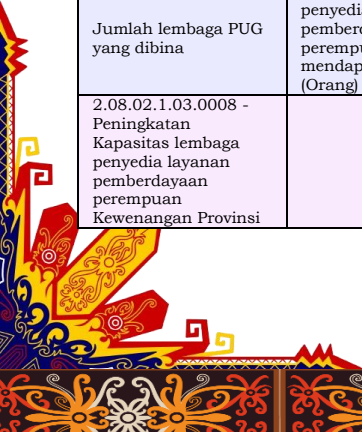
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender bagi Perangkat Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	3,21	3,50	950.000.000,00	3,77	950.000.000,00	3,90	1.047.000.000,00	4,20	1.650.000.000,00	4,50	1.950.000.000,00	2.08.2.14.0.00. 02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.1.01 - Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				350.000.000,00		350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		
Jumlah dokumen penunjang pelebagaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	0	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		
	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	50	50		50		50		50		50			
	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek (orang)	0	40		45		50		55		60			
2.08.02.1.01.0005 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
2.08.02.1.01.0010 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek (orang)	0	40	150.000.000,00	45	150.000.000,00	50	150.000.000,00	55	150.000.000,00	60	250.000.000,00		
2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		



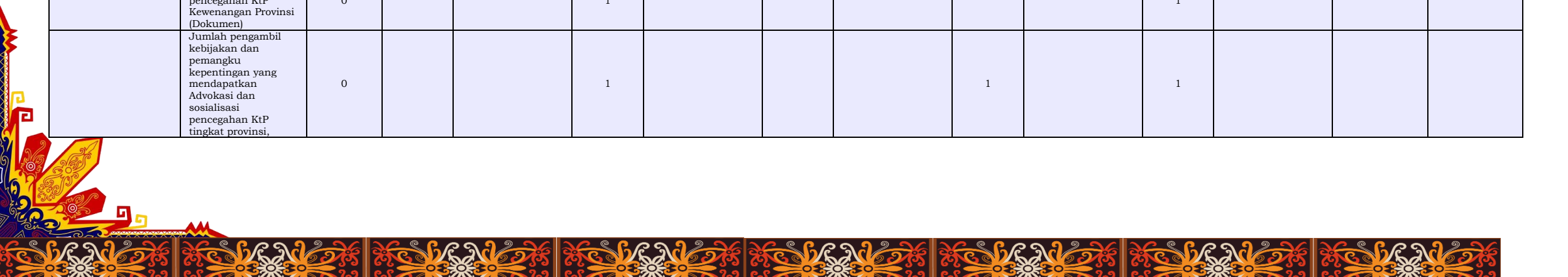
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	50	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00		
2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi				350.000.000,00		350.000.000,00		547.000.000,00		1.150.000.000,00		1.300.000.000,00		
Jumlah kader parpol/organisasi perempuan yang dibina	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	0	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	2	547.000.000,00	5	1.150.000.000,00	6	1.300.000.000,00		
	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	0	30		30		30		30		30			
	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	0	40		45		50		55		60			
2.08.02.1.02.0005 - Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		297.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2	297.000.000,00	5	900.000.000,00	6	1.000.000.000,00		



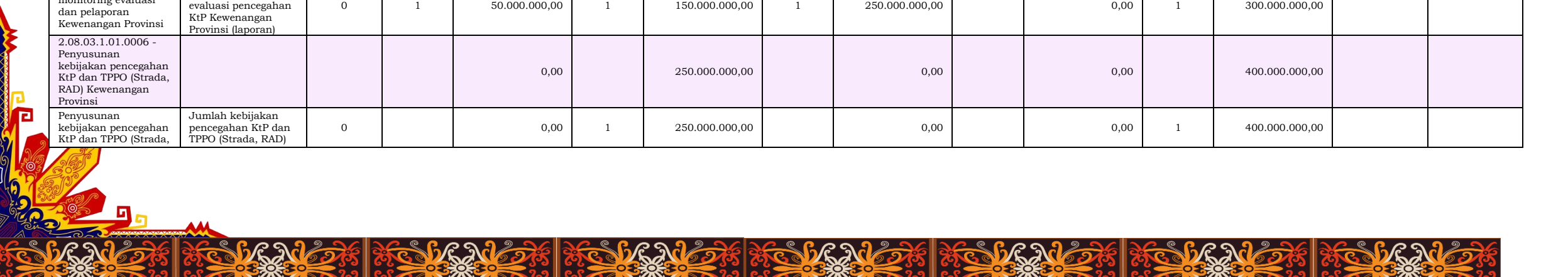
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	0	40	150.000.000,00	45	150.000.000,00	50	150.000.000,00	55	150.000.000,00	60	200.000.000,00		
2.08.02.1.02.0009 - peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	0	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00		
2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		
Jumlah lembaga PUG yang dibina	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	40	250.000.000,00	45	250.000.000,00	50	250.000.000,00	55	250.000.000,00	60	300.000.000,00		
2.08.02.1.03.0008 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	40	250.000.000,00	45	250.000.000,00	50	250.000.000,00	55	250.000.000,00	60	300.000.000,00		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				940.000.000,00		2.334.814.987,66		1.980.863.717,12		2.450.000.000,00		3.700.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap Perempuan Korban Kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	500.000.000,00	100	1.781.764.444,90	100	1.399.320.354,20	100	1.850.000.000,00	100	3.100.000.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		1.200.000.000,00		550.000.000,00		750.000.000,00		1.850.000.000,00		
Jumlah kasus kekerasan perempuan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (laporan)	0	1	200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	550.000.000,00		750.000.000,00	1	1.850.000.000,00		
	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	0			1						1			
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0			1						1			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi,	0			1				1		1			



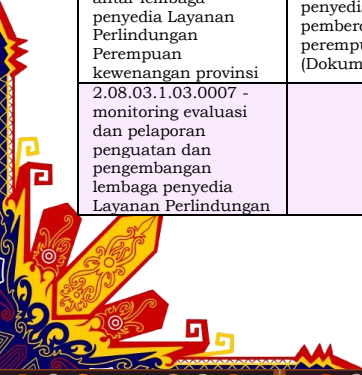
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)													
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	0	15		25		30		35		50			
2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0		0,00	1	250.000.000,00		0,00		0,00	1	400.000.000,00		
2.08.03.1.01.0004 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				150.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	0	15	150.000.000,00	25	250.000.000,00	30	300.000.000,00	35	350.000.000,00	50	500.000.000,00		
2.08.03.1.01.0005 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				50.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		0,00		300.000.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (laporan)	0	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00		0,00	1	300.000.000,00		
2.08.03.1.01.0006 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi				0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		400.000.000,00		
Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada,	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD)	0		0,00	1	250.000.000,00		0,00		0,00	1	400.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
RAD) Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi (Kebijakan)													
2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				0,00		300.000.000,00		0,00		400.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	0		0,00	1	300.000.000,00		0,00	1	400.000.000,00	1	250.000.000,00		
2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				300.000.000,00		581.764.444,90		849.320.354,20		1.100.000.000,00		1.250.000.000,00		
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang diberikan penguatan dan pendampingan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	0		300.000.000,00		581.764.444,90	1	849.320.354,20	1	1.100.000.000,00		1.250.000.000,00		
	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	30		35		40				50			
	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0			1		1				2			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	0							1					



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kewenangan provinsi (Laporan)													
	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0							2		2			
2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		0,00		500.000.000,00		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	30	300.000.000,00	35	350.000.000,00	40	400.000.000,00		0,00	50	500.000.000,00		
2.08.03.1.03.0006 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		400.000.000,00		450.000.000,00		0,00		
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	0		0,00		0,00	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00		0,00		
2.08.03.1.03.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan				0,00		0,00		0,00		250.000.000,00		0,00		



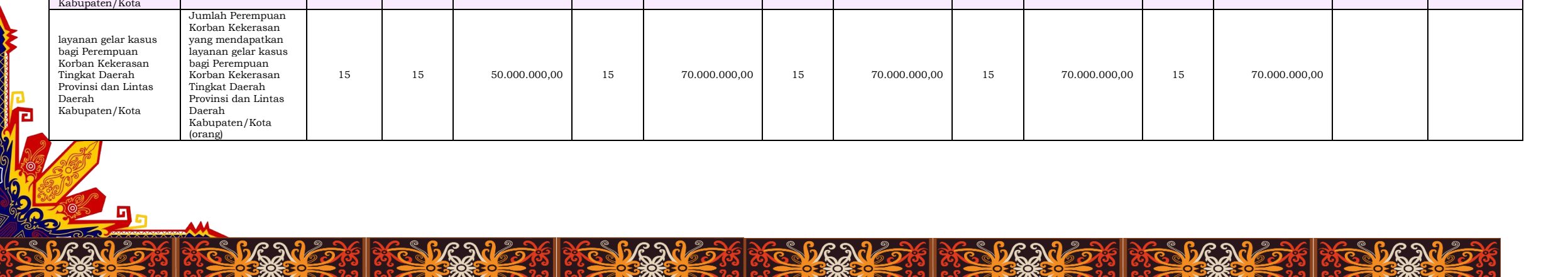
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perempuan kewenangan provinsi														
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)	0		0,00		0,00		0,00	1	250.000.000,00		0,00		
2.08.03.1.03.0008 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi				0,00		231.764.444,90		49.320.354,20		0,00		500.000.000,00		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0		0,00	1	231.764.444,90	1	49.320.354,20		0,00	2	500.000.000,00		
2.08.03.1.03.0009 - Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				0,00		0,00		0,00		400.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0		0,00		0,00		0,00	2	400.000.000,00	2	250.000.000,00		
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,00 penduduk perempuan) (%)	57:57	56:56	440.000.000,00	55:55	553.050.542,76	54:54	581.543.362,92	53:53	600.000.000,00	52:52	600.000.000,00	2.08.2.14.0.00. 02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				440.000.000,00		553.050.542,76		581.543.362,92		600.000.000,00		600.000.000,00		
Presentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	440.000.000,00	15	553.050.542,76	15	581.543.362,92	15	600.000.000,00	15	600.000.000,00		
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	15	15		15		15		15		15			



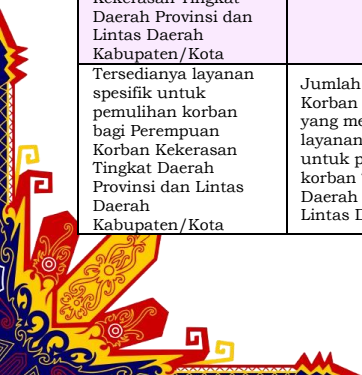
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	15	15		15		15		15		15			
2.08.03.1.02.0003 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	15	15	50.000.000,00	15	70.000.000,00	15	70.000.000,00	15	70.000.000,00	15	70.000.000,00		



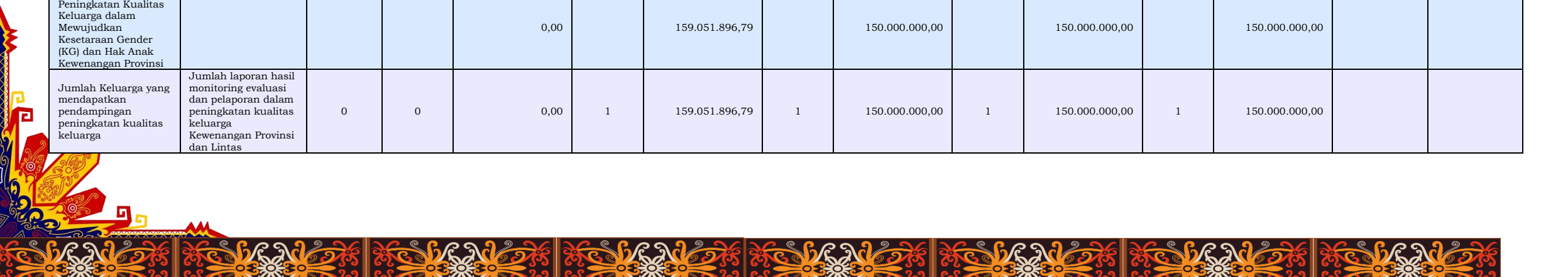
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.1.02.0004 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000,00		100.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	60.000.000,00	15	100.000.000,00	15	80.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	15	15	40.000.000,00	15	50.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
2.08.03.1.02.0006 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	40.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		



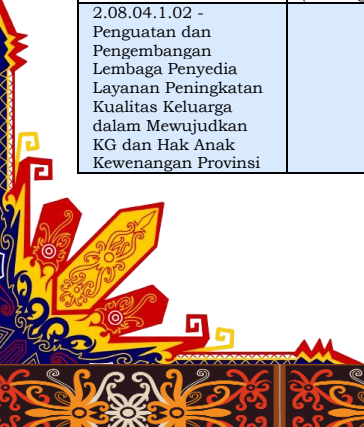
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.1.02.0007 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		
2.08.03.1.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		133.050.542,76		131.543.362,92		130.000.000,00		130.000.000,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	100.000.000,00	15	133.050.542,76	15	131.543.362,92	15	130.000.000,00	15	130.000.000,00		
2.08.03.1.02.0009 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	15	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Orang)													
2.08.03.1.02.0010 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				200.000.000,00		609.051.896,79		754.544.424,88		850.000.000,00		850.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	52,14	54,20	200.000.000,00	55,00	609.051.896,79	55,75	754.544.424,88	56,50	850.000.000,00	57,00	850.000.000,00	2.08.2.14.0.00. 02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				0,00		159.051.896,79		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Jumlah Keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas	0	0	0,00	1	159.051.896,79	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		

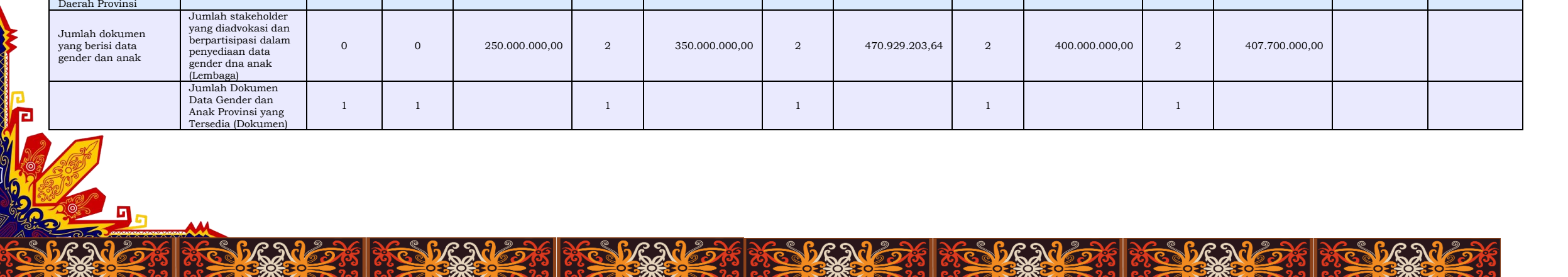


BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Dokumen)													
	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0			1		1		1		1			
2.08.04.1.01.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.08.04.1.01.0005 - penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0,00		109.051.896,79		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0		0,00	1	109.051.896,79	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.08.04.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				0,00		200.000.000,00		304.544.424,88		350.000.000,00		350.000.000,00		

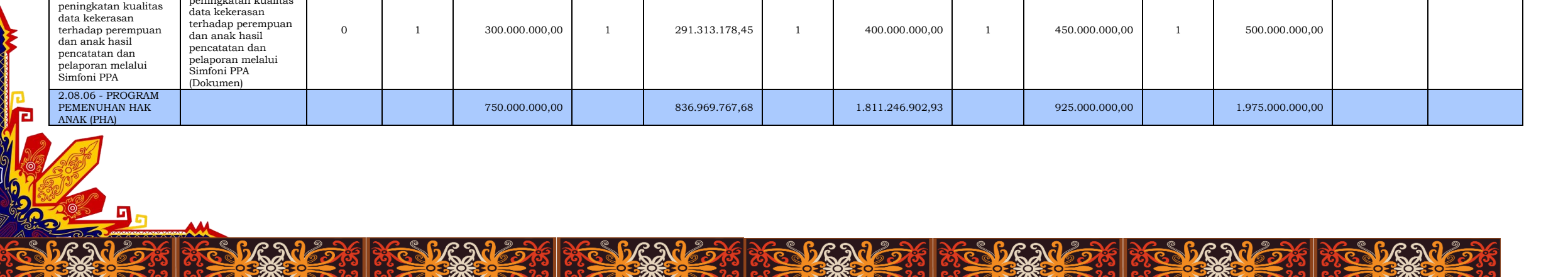


BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah lembaga yang menyediakan layanan bagi peningkatan kualitas keluarga	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0		0,00	0	200.000.000,00	1	304.544.424,88		350.000.000,00		350.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	0		25		30		35		35			
2.08.04.1.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				0,00		0,00		74.544.424,88		0,00		0,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0		0,00	0	0,00	1	74.544.424,88		0,00		0,00		
2.08.04.1.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				0,00		200.000.000,00		230.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	0	0,00	25	200.000.000,00	30	230.000.000,00	35	350.000.000,00	35	350.000.000,00		
2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan	0	20	200.000.000,00	25	250.000.000,00	30	300.000.000,00	35	350.000.000,00	35	350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Wilayah Kerjanya Lintas Daerah	Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (Orang)													
2.08.04.1.03.0005 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota (Orang)	0	20	200.000.000,00	25	250.000.000,00	30	300.000.000,00	35	350.000.000,00	35	350.000.000,00		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				550.000.000,00		641.313.178,45		870.929.203,64		850.000.000,00		907.700.000,00		
Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	550.000.000,00	100	641.313.178,45	100	870.929.203,64	100	850.000.000,00	100	907.700.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi				550.000.000,00		641.313.178,45		870.929.203,64		850.000.000,00		907.700.000,00		
Jumlah dokumen yang berisi data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	0	250.000.000,00	2	350.000.000,00	2	470.929.203,64	2	400.000.000,00	2	407.700.000,00		
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

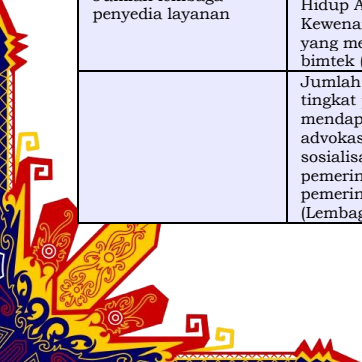


BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.05.1.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak				0,00		100.000.000,00		220.929.203,64		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	0	0,00	2	100.000.000,00	2	220.929.203,64	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
2.08.05.1.01.0005 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		307.700.000,00		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	307.700.000,00		
Jumlah dokumen yang berisi data Simfoni PPPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	0	1	300.000.000,00	1	291.313.178,45	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00		
2.08.05.1.01.0003 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA				300.000.000,00		291.313.178,45		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	0	1	300.000.000,00	1	291.313.178,45	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				750.000.000,00		836.969.767,68		1.811.246.902,93		925.000.000,00		1.975.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA (Persentase)	40	60	750.000.000,00	60	836.969.767,68	80	1.811.246.902,93	80	925.000.000,00	100	1.975.000.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				300.000.000,00		211.969.767,68		786.246.902,93		150.000.000,00		800.000.000,00		
Jumlah lembaga PHA	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Laporan)	0	1	300.000.000,00	1	211.969.767,68	1	786.246.902,93	1	150.000.000,00	1	800.000.000,00		
	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Orang)	0	30				30				40			
	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi (Kebijakan)	0			1		1							
2.08.06.1.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				0,00		161.000.000,00		300.000.000,00		0,00		0,00		
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi (Kebijakan)	0		0,00	1	161.000.000,00	1	300.000.000,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06.1.01.0006 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				250.000.000,00		0,00		350.000.000,00		0,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Orang)	0	30	250.000.000,00		0,00	30	350.000.000,00		0,00	40	450.000.000,00		
2.08.06.1.01.0008 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				50.000.000,00		50.969.767,68		136.246.902,93		150.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	50.969.767,68	1	136.246.902,93	1	150.000.000,00	1	350.000.000,00		
2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				450.000.000,00		625.000.000,00		1.025.000.000,00		775.000.000,00		1.175.000.000,00		
Jumlah lembaga penyedia layanan	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	30	450.000.000,00	30	625.000.000,00	50	1.025.000.000,00	50	775.000.000,00	50	1.175.000.000,00		
	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	15		15		30		25		30			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	2		2		2				2			
	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	0	0		1		1		1		1			
2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.08.06.1.02.0008 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				150.000.000,00		200.000.000,00		350.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	15	150.000.000,00	15	200.000.000,00	30	350.000.000,00	25	300.000.000,00	30	350.000.000,00		
2.08.06.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				200.000.000,00		250.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	30	200.000.000,00	30	250.000.000,00	50	450.000.000,00	50	450.000.000,00	50	450.000.000,00		
2.08.06.1.02.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan				100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		0,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00		0,00	2	350.000.000,00		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1.010.000.000,00		2.745.690.439,96		2.803.178.761,49		3.550.000.000,00		3.800.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Anak Korban Kekerasan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	550.000.000,00	100	2.100.464.806,74	100	2.124.711.504,75	100	2.850.000.000,00	100	3.100.000.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%)	57:57	56:56		55:55		54:54		53:53		52:52			
2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				230.000.000,00		750.464.806,74		774.711.504,75		1.300.000.000,00		1.150.000.000,00		
Rasio dan persentase kekerasan terhadap anak	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Orang)	0	0	230.000.000,00	50	750.464.806,74	50	774.711.504,75	50	1.300.000.000,00	50	1.150.000.000,00		
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	0		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Laporan)	0	0		1		1				1			
	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)	0	0		0		0		1		1			
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1						1					
2.08.07.1.01.0006 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Orang)	0	0	0,00	50	350.000.000,00	50	350.000.000,00	50	350.000.000,00	50	350.000.000,00		
2.08.07.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi				0,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	0	0,00	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00		
2.08.07.1.01.0008 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi				0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		350.000.000,00		
Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	1	350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kewenangan Provinsi (Kebijakan)													
2.08.07.1.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				230.000.000,00		0,00		0,00		400.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1	230.000.000,00		0,00		0,00	1	400.000.000,00		0,00		
2.08.07.1.01.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				0,00		100.464.806,74		74.711.504,75		0,00		100.000.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Laporan)	0	0	0,00	1	100.464.806,74	1	74.711.504,75		0,00	1	100.000.000,00		
2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				320.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.550.000.000,00		1.950.000.000,00		
Jumlah lembaga layanan bagi anak yang diberikan penguatan dan pengembangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	30	320.000.000,00	30	1.350.000.000,00	30	1.350.000.000,00	30	1.550.000.000,00	30	1.950.000.000,00		
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Lembaga)	0	0		2		0		2		2			
	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	0	1		1		1		0		1			
	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	0	0		50		50		50		50			
2.08.07.1.03.0006 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi				20.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
2.08.07.1.03.0009 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		0,00		300.000.000,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	0	0,00	1	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07.1.03.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi				0,00		300.000.000,00		0,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Lembaga)	0	0	0,00	2	300.000.000,00	0	0,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
2.08.07.1.03.0011 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	0	0	0,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00		
2.08.07.1.03.0012 - Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				100.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non	0	30	100.000.000,00	30	200.000.000,00	30	400.000.000,00	30	400.000.000,00	30	400.000.000,00		

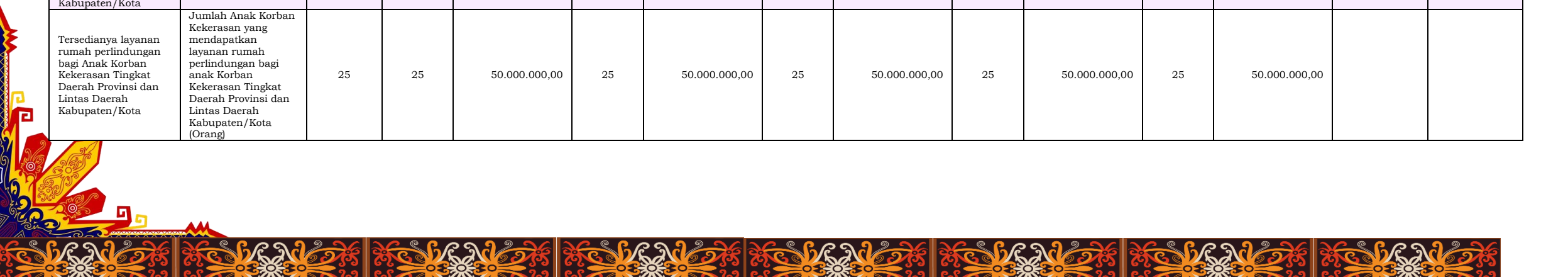
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pemerintah) (Lembaga)													
2.08.07.1.03.0013 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi				0,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Laporan)	0	1	0,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (%)	10.7:10.7	9.5:9.5	460.000.000,00	8.5:8.5	645.225.633,22	8:8	678.467.256,74	7.5:7.5	700.000.000,00	7:7	700.000.000,00	2.08.2.14.0.00. 02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				460.000.000,00		645.225.633,22		678.467.256,74		700.000.000,00		700.000.000,00		
Persentase jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	460.000.000,00	25	645.225.633,22	25	678.467.256,74	25	700.000.000,00	25	700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	25	25		25		25		25		25			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25		25		25		25		25			
2.08.07.1.02.0008 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	50.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00		
2.08.07.1.02.0009 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00		
2.08.07.1.02.0010 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan				110.000.000,00		145.225.633,22		178.467.256,74		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	110.000.000,00	25	145.225.633,22	25	178.467.256,74	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00		
2.08.07.1.02.0011 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	50.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00		
2.08.07.1.02.0012 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	50.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00		
2.08.07.1.02.0013 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&														
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00		
2.08.07.1.02.0014 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00		
2.08.07.1.02.0015 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.200.000.000,00		2.657.427.804,28		3.095.640.708,40		3.200.000.000,00		3.250.000.000,00		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				500.000.000,00		1.013.925.995,07		1.163.162.832,01		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		
Meningkatnya Pengendalian Angka Kelahiran Total	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,27	2,24	500.000.000,00	2,22	1.013.925.995,07	2,21	1.163.162.832,01	2,20	1.100.000.000,00	2,18	1.100.000.000,00	2.08.2.14.0.00. 02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				500.000.000,00		1.013.925.995,07		1.163.162.832,01		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		
Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain (Daerah)	0	0	500.000.000,00	2	1.013.925.995,07	3	1.163.162.832,01	4	1.100.000.000,00	4	1.100.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	0							1		1			
	Jumlah fasilitasi provinsi dalam penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan	0			1		2		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kependudukan (IPBK) (Kab/Kota)													
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		0		0			
2.14.02.1.01.0014 - Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)				0,00		213.925.995,07		363.162.832,01		200.000.000,00		200.000.000,00		
tersedianya fasilitasi penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah fasilitasi provinsi dalam penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Kab/Kota)	0		0,00	1	213.925.995,07	2	363.162.832,01	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.14.02.1.01.0021 - Advokasi dan Sosialisasi GDPK				0,00		0,00		0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	0		0,00		0,00		0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
2.14.02.1.01.0022 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				500.000.000,00		500.000.000,00		400.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dokumen)	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.14.02.1.01.0024 - Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program				0,00		300.000.000,00		400.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		

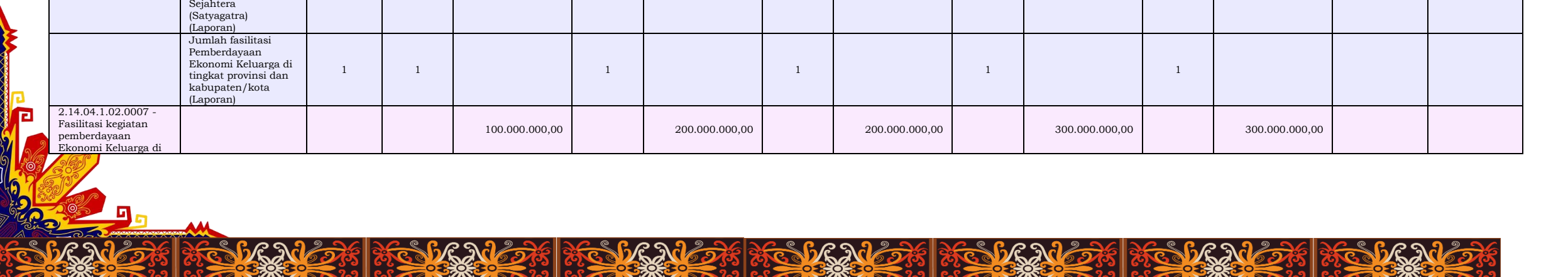
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)			(11)
Bangga Kencana dan Sektor Lain															
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain (Daerah)	0	0	0,00	2	300.000.000,00	3	400.000.000,00	4	650.000.000,00	4	650.000.000,00			
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				350.000.000,00		645.225.633,22		775.467.256,74		800.000.000,00		850.000.000,00			
Meningkatnya Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))	67,00	69,20	350.000.000,00	70,00	645.225.633,22	71,00	775.467.256,74	71,50	800.000.000,00	72,00	850.000.000,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				250.000.000,00		545.225.633,22		675.467.256,74		700.000.000,00		700.000.000,00			
Jumlah Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	545.225.633,22	1	675.467.256,74	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	0	0		1		2		2		2			
2.14.03.1.01.0007 - Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				250.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
2.14.03.1.01.0009 - Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan				0,00		195.225.633,22		325.467.256,74		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Promosi Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	0	0	0,00	1	195.225.633,22	2	325.467.256,74	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00		
2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Jumlah Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Bangga Kencana) (Organisasi)													
2.14.03.1.02.0004 - Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		
Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Organisasi)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	150.000.000,00		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				350.000.000,00		998.276.175,99		1.157.010.619,65		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		
Menurunnya Angka Kelahiran Remaja	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	26.10- 26.10	25.25- 25.25	350.000.000,00	24.85- 24.85	998.276.175,99	24.46- 24.46	1.157.010.619,65	24.09- 24.09	1.300.000.000,00	23.40- 23.40	1.300.000.000,00	2.08.2.14.0.00. 02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				150.000.000,00		548.276.175,99		657.010.619,65		600.000.000,00		800.000.000,00		
Jumlah Pembangunan Ketahan Keluarga yang dibina	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Laporan)	0	1	150.000.000,00	1	548.276.175,99	1	657.010.619,65	1	600.000.000,00	1	800.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	0		30				30					
	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja (Daerah)	0	0		1		1				1			
	Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Daerah)	0	0		0		2				2			
2.14.04.1.01.0016 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0,00		248.276.175,99		0,00		250.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	0	0,00	30	248.276.175,99		0,00	30	250.000.000,00		0,00		
2.14.04.1.01.0020 - Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				0,00		150.000.000,00		200.000.000,00		0,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja (Daerah)	0	0	0,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00		0,00	1	200.000.000,00		
2.14.04.1.01.0027 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi				0,00		0,00		207.010.619,65		0,00		250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Daerah)	0	0	0,00	0	0,00	2	207.010.619,65		0,00	2	250.000.000,00		
2.14.04.1.01.0028 - Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)				150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Laporan)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				200.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00		
Jumlah Kualitas Keluarga Sejahtera	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Laporan)	0	1	200.000.000,00	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00	1	700.000.000,00	1	500.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) (Laporan)						1		1					
	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.14.04.1.02.0007 - Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tingkat provinsi dan kabupaten/kota														
Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
2.14.04.1.02.0010 - Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) (Laporan)			0,00		0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		0,00		
2.14.04.1.02.0011 - Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				100.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Laporan)	0	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00		



Tabel 4.4
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kalimantan Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.348.500.000		2.396.552.351,97		2.520.021.239,3		2.600.000.000		2.600.000.000		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.348.500.000		2.396.552.351,97		2.520.021.239,3		2.600.000.000		2.600.000.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja administrasi perangkat daerah (%)	100	100	1.348.500.000	100	2.396.552.351,97	100	2.520.021.239,3	100	2.600.000.000	100	2.600.000.000	2.08.2.14.0.00.02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		
Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8	12	100.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000		
2.08.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8	12	100.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	7	50.000.000	7	100.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000		
2.08.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	7	50.000.000	7	100.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000		
2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				358.500.000		836.552.351,97		810.021.239,3		1.210.000.000		1.210.000.000		
2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi														
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.08.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	50.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
2.08.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.08.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	100.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000		
2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	200.000.000	12	300.000.000	12	370.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000		
2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				255.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		380.000.000		
2.08.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	6	100.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000		
2.08.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel														
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	2	10.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	15	15.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000		
2.08.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				130.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	130.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				440.000.000		553.050.542,76		581.543.362,92		600.000.000		600.000.000		
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%)	57:57	56:56	440.000.000	55:55	553.050.542,76	54:54	581.543.362,92	53:53	600.000.000	52:52	600.000.000	2.08.2.14.0.00.02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				440.000.000		553.050.542,76		581.543.362,92		600.000.000		600.000.000		
2.08.03.1.02.0003 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	15	15	50.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000		
2.08.03.1.02.0004 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	15	15	40.000.000	15	50.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000		
2.08.03.1.02.0006 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	40.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
2.08.03.1.02.0007 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000		
2.08.03.1.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		133.050.542,76		131.543.362,92		130.000.000		130.000.000		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	100.000.000	15	133.050.542,76	15	131.543.362,92	15	130.000.000	15	130.000.000		
2.08.03.1.02.0009 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	15	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000		
2.08.07.1.02.0014 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000		
2.08.07.1.02.0015 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	25	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000		



Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.5 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.08.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender bagi Perangkat Daerah	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.01.0005 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.01.0010 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.02.0009 - peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
3.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya Kualitas Layanan terhadap Perempuan Korban Kekerasan	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.1.01.0004 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
4.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.1.03.0005 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
5.	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak	2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	
			2.08.05.1.01.0003 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
			2.08.05.1.01.0005 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
6.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak	2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
			2.08.06.1.02.0008 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
			2.08.06.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
7.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Kualitas Layanan Terhadap Anak Korban Kekerasan	2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.1.03.0012 - Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	
8.	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Pengendalian Angka Kelahiran Total	2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			2.14.02.1.01.0014 - Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	
			2.14.02.1.01.0022 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	
9.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern	2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.1.01.0007 - Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.1.02.0004 - Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	
10.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Menurunnya Angka Kelahiran Remaja	2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.1.01.0028 - Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	
			2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.1.02.0007 - Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	
			2.14.04.1.02.0011 - Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	
2.08.2.14.0.00.02.0001 - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak				
11.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
12.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
			2.08.07.1.02.0008 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh DPPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I.	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,418	0,43	0,43	0,42	0,41	0,4	0,39	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas PPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)		%	57:57	57:57	56:56	55:55	54:54	53:53	52:52	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		Indeks	59,53	59,53	59,78	60,04	60,29	60,54	60,80	
4.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	positif	Nilai	700	710-710	720-720	730-730	740-740	750-750	760-760	
5.	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	negatif	%	7.41:7.41	7.30:7.30	7.19:7.19	7.10:7.10	6.90:6.90	6.75:6.75	6.60:6.60	
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	positif	%	52,14	53,56	54,98	56,4	57,82	58,05	59,47	
7.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	positif	Persentase	3,21	3,29	3,50	3,77	3,90	4,20	4,50	
9.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
11.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	positif	Indeks	65,45	67,45	68,55	69,95	71,26	72,49	73,63	
12.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	negatif	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	26.10-26.10	25.67-25.67	25.25-25.25	24.85-24.85	24.46-24.46	24.09-24.09	23.40-23.40	
13.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	positif	%	67,00	68,00	69,20	70,00	71,00	71,50	72,00	
14.	TFR (Angka Kelahiran Total)	negatif	Jiwa	2,27	2,25	2,24	2,22	2,21	2,20	2,18	



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025– 2029 merupakan intisari dari terjemahan fungsi dinas yaitu:

- a. Penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Panduan bagi setiap bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara dalam mengukur akuntabilitas dari kinerja yang telah dilakukan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat menilai tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan baik.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan rencana strategis sebagai berikut:

1. Renstra DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan di seluruh bidang baik dalam menyusun kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi;
2. Dalam pelaksanaan Renstra DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara selalu mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pencapaian setiap output dan outcome kinerja DP3AP2KB antar bidang;
3. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan Renstra DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara harus memperhatikan nilai-nilai: Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta keluarga berencana;
4. Masyarakat luas, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat akademisi, dan instansi terkait berperan serta seluas-luasnya dalam pelaksanaan rencana aksi dari dokumen Renstra DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara.
5. Apabila terdapat perubahan strategis dan dinamika pembangunan yang belum diakomodasikan dalam pelaksanaan Renstra DP3AP2KB tahun 2025 – 2029 dapat dilakukan revisi/perbaikan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Secara berkala pada setiap akhir tahun, setiap Bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap output, outcome maupun dampak terhadap pencapaian sasaran kegiatan. Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas P3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut





PROVINSI KALIMANTAN UTARA



 Dinas Pemberdayaan Perempuan Kaltara

 dp3ap2kb_kaltara

 <https://dppppappkb.kaltaraprov.go.id>

 dp3ap2kb.kaltara@gmail.com